



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PROTES WARGA TERHADAP PJOK (PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL
KEGIATAN) KOTA PADANG MENGENAI PENYALURAN DANA REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 30 SEPTEMBER 2009
SUMATERA BARAT TAHAP III
(Studi Pada Kelurahan Surau Cadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang)**

SKRIPSI



**SOVIA JASMAN
0810811003**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

ABSTRAK

Sovia Jasman, 0810811003. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Judul Skripsi : Protes Warga Terhadap PJOK Kota Padang Mengenai Penyaluran Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat Tahap III. Studi pada Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Pembimbing I Prof.Dr.Afrizal.MA, dan Pembimbing II Dra. Mira Elfina, M.Si.

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan dana hibah yang disalurkan pemerintah kepada warga untuk perbaikan rumah yang rusak akibat gempa 30 September 2009 di Sumatera Barat. Namun, keberadaan dana hibah ini justru menimbulkan berbagai persoalan dalam penyalurannya, sehingga memunculkan aksi kolektif warga terhadap pemerintah. Aksi tersebut berupa protes yang dilakukan oleh warga kepada PJOK Kota Padang sebagai penanggung jawab dalam penyaluran dana hibah tersebut. Oleh sebab itu, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa warga protes kepada PJOK kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyebab warga melakukan protes dan mendeskripsikan bentuk-bentuk protes warga kepada PJOK kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III.

Penelitian ini menggunakan Teori Protes milik Neil J. Smelser karena protes merupakan perilaku kolektif yang berhubungan dengan gerakan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud adalah adanya frasa (rasa) perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah baik dalam aspek maupun unsur yang terkait didalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. Penentuan informannya dengan cara *Proposive Sampling* (secara sengaja). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan tidak berstruktur.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa protes warga kepada PJOK Kota Padang terjadi karena adanya ketidakpuasan warga terhadap pendataan dalam penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III. Sehingga warga melakukan aksi protes kepada PJOK dan instansi terkait untuk memperjuangkan haknya sebagai penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September Sumatera Barat tahap III. Bentuk protes terhadap PJOK kota Padang tidak semuanya membuahkan hasil. Ada warga yang pantas sebagai penerima dana dan ada juga yang tidak pantas sebagai penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Sumatera Barat tahap III.

ABSTRACT

Sovia Jasman, 0810811003. Mayors Sociology, Faculty of Social and Political Sciences Andalas University, Padang. The thesis entitle: Citizens Protest Against PJOK Padang Regarding Funds Post-Earthquake Rehabilitation and Reconstruction of 30 September 2009 West Sumatra. Studies on the mosque Tower Village District Nanggalo Padang. Counselor Of I Prof.Dr.Afrizal.MA, and Conselor Of II Dra. Mira Elfina, M.Sc.

Rehabilitation and reconstruction funds are government grants are distributed to residents for home improvements damaged by the 30 September 2009 earthquake in West Sumatra. However, the disbursement of the funds of the uneven distribution of funds which led to the emergence of collective action of citizens against the government. The form of protest action by residents to the city of Padang PJOK was responsible for the disbursement of grant funds. Research on the beneficiary protests post-earthquake rehabilitation and rekonstruksi is necessary to answer the research problems that cause people to protest and the protest made to the citizens of the city of Padang on PJOK funds rehabilitation and reconstruction after the earthquake in West Sumatra, 30 September 2009. Therefore, the purpose of this study was to describe the protests of citizens against the city of Padang on PJOK funds rehabilitation and reconstruction after the earthquake in West Sumatera, 30 September 2009.

This study uses a theory of Neil J Smelser's protest because the protest is related to the collective behavior of social movements. Social movement in question is the phrase (sense of) the struggle waged by the people without any interference from the government, both in aspect and related elements in it. The method used in this study is a qualitative method with the type of research that is deskriptif. Determination of informants by Proposive Sampling (intentionally). Collecting data in this study was done by using in-depth interviews and unstructured.

From the results of the study concluded that the protests of citizens against the city of Padang PJOK occur because people are not listed on the beneficiary rehabilitation and reconstruction after the earthquake in West Sumatra, 30 September 2009 stage III. So citizens protesting the PJOK and relevant agencies to fight for their rights as a recipient of funds for the rehabilitation and reconstruction after the earthquake in West Sumatera, 30 September phase III.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Protes Warga Terhadap PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Kota Padang Mengenai Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat Tahap III (Studi pada Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang)**. Selawat beserta salam penulis ucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau penulis juga ikut memperoleh kesempatan yang sama dalam merasakan indahnya kedamaian dan memperoleh pendidikan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, do'a serta pengarahan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Afrizal MA. selaku pembimbing I, yang selalu memberikan bimbingan akademik, arahan, petunjuk dan memberikan motivasi bagi penulis untuk tidak menyerah serta membantu penulis memahami kesulitan-kesulitan penelitian yang merupakan sebuah tantangan yang harus dijalani.
2. Ibu Dra. Mira Elfina, M.Si selaku pembimbing II yang sangat kritis dan membantu penulis menyadari kesalahan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga perbaikan pun cepat dilakukan.
3. Tim penguji yang telah memberikan berbagai macam masukan dan saran serta kritikan yang bermanfaat bagi skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen, staf serta karyawan di FISIP UNAND yang memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menghadapi permasalahan akademik.
5. Seluruh informan dalam penelitian ini yaitu PJOK Kota Padang dan warga kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo yang sangat berpartisipasi dalam penelitian ini serta memberikan data-data tertulis maupun lisan yang penulis butuhkan, terimakasih atas kerjasama dan informasi yang telah diberikan kepada penulis.
6. Kepada kedua Orang Tua, dan Adik serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, doa dan semangat kepada penulis untuk tetap semangat menjalani setiap rintangan dan halangan dalam menjalani kehidupan serta dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh sahabat-sahabat Sosiologi 2008. Bersama teman-teman, penulis dapat melupakan sejenak keluh kesah yang ada.

Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu Sosiologi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna, sebagai akibat dari pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Namun demikian penulis sangat merasakan bahwa hal itu merupakan pendorong untuk melangkah lebih maju dalam menempuh dan menggali ilmu pengetahuan lebih lanjut. Sebelum dan sesudahnya penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, April 2012

Sovia Jasman

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembaran Pengesahan	
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	Viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
 1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka.....	10
1.5.1 Gerakan Sosial Dan Konfik.....	10
1.5.2 Pengertian Protes.....	11
1.5.3 Perspektif Sosiologis.....	12
1.5.3.1 Protes Menurut Perspektif Sosiologis.....	12
1.5.3.2 Teori Protes.....	13
1.5.3.3 Teori Ketegangan Struktural.....	14
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Pendekatan Penelitian Dan Tipe Penelitian.....	16
1.6.2 Informan Penelitian.....	18
1.6.3 Data Yang Diambil.....	19
1.6.4 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.....	19
1.6.5 Unit Analisis.....	21
1.6.6 Analisis Data.....	21
1.6.7 Proses Penelitian.....	24
1.6.8 Defenisi Operasional.....	27
1.6.9 Lokasi Penelitian.....	28
1.6.10 Jadwal Penelitian.....	29

BAB II DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1 Deskripsi Kecamatan Nanggalo.....	30
2.1.1 Keadaan Dan Kondisi Geografis Kecamatan Nanggalo.....	30
2.2 Keadaan Demografis Kelurahan	
Surau Gadang.....	32
2.2.1 Kependudukan.....	32
2.2.2 Mata Pencarian Penduduk.....	34
2.2.3 Sarana Pendidikan Dan Keagamaan.....	35
2.2.4 Sarana Dan Prasarana Sosial.....	36
2.2.5 Kondisi Sosial Budaya.....	37
2.3 Data Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III.....	38
2.3.1 Data Kerusakan Gempa.....	38
2.3.2 Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Kelurahan.....	38

BAB III PROTES WARGA TERHADAP PJOK KOTA PADANG MENGENAI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 30 SEPTEMBER 2009 SUMATERA BARAT TAHAP III

3.1 Kebijakan Pemerintah.....	41
3.2 Protes Warga.....	49
3.2.1 Aktor Protes.....	49
3.2.2 Penyebab Protes	50
3.2.2.1 Ketegangan Antar Warga Dengan PJOK.....	50
3.2.2.2 Warga Tidak Paham Juknis.....	55
3.3 Cara Penyampaian Aspirasi.....	59
3.4 Hasil Protes.....	62
3.5 Situasi Terkini.....	64

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Kerusakan Akibat Gempa Bumi Sumatera Barat Pada Tahun 2009.....	2
Tabel 1.2 Kerusakan Perumahan Akibat Gempa Bumi Sumatera Barat Pada Tahun 2009.....	3
Tabel 1.3 Jumlah Kerusakan Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat Tahun 2009.....	5
Tabel 1.4 Jadwal Penelitian.....	29
Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kelurahan.....	31
Tabel 2.3 Jumlah RT, RW, KK dan Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan.....	33
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 2.5 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	35
Tabel 2.6 Data Kerusakan Perumahan Di Kelurahan Surau Gadang Pasca Gempa 30 September 2009 Tahap III.....	38
Tabel 2.7 Data Fasilitator Dan Pokmas Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.....	40
Tabel 3.1 Data Pengaduan Masyarakat Penyaluran Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.....	50
Tabel 3.2 Penetapan Kriteria Kerusakan Perumahan.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Peta Kecamatan Nanggalo (BPS Tahun 2010).....	30
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa Sumatera Barat Tahap III....	46
Gambar 3.2 Proses Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Tahun 2011.....	47
Gambar 3.3 Mediasi Antara Warga Surau Gadang Dengan PJOK Kota Padang Di Kantor Kom Nas Ham Padang.....	51
Gambar 3.4 Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Perumahan Tahap III.....	56
Gambar 3.5 Rumah Penerima Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat Tahap III.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Riwayat Hidup.

Lampiran 2. Pedoman Wawancara.

Lampiran 3. Data-Data Informan.

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5. Izin Penelitian.

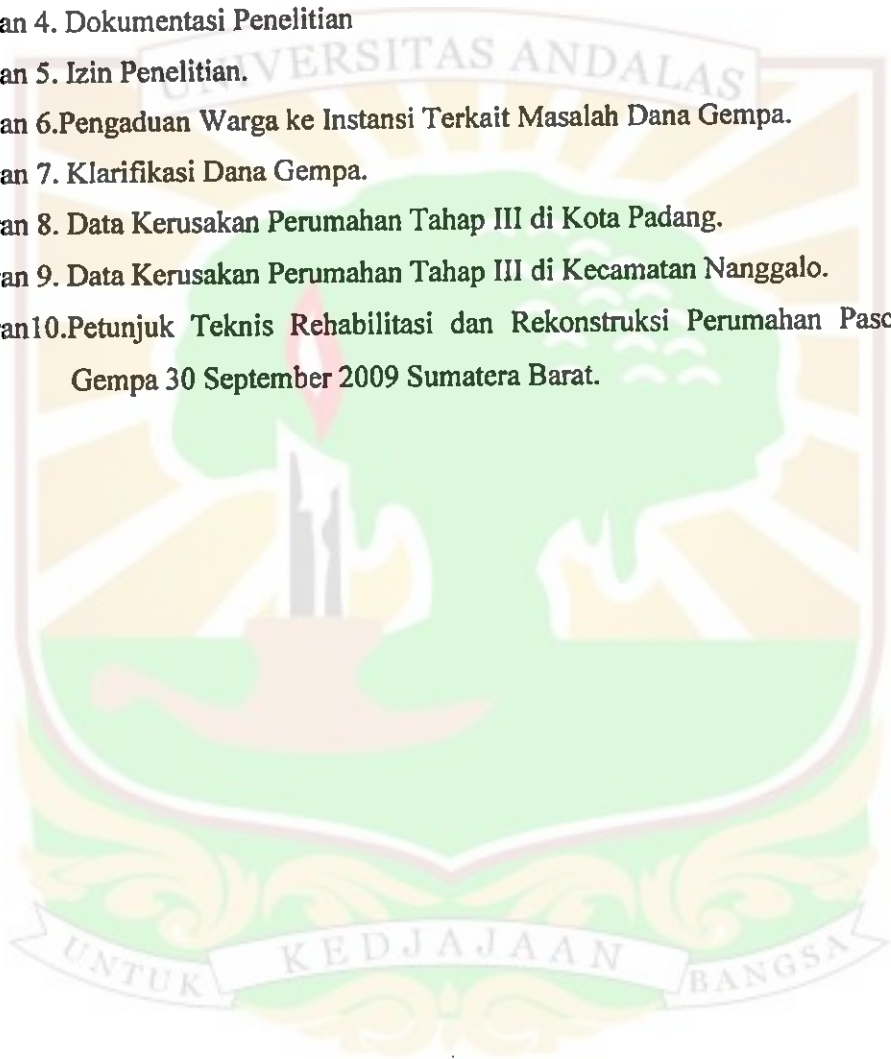
Lampiran 6. Pengaduan Warga ke Instansi Terkait Masalah Dana Gempa.

Lampiran 7. Klarifikasi Dana Gempa.

Lampiran 8. Data Kerusakan Perumahan Tahap III di Kota Padang.

Lampiran 9. Data Kerusakan Perumahan Tahap III di Kecamatan Nanggalo.

Lampiran 10. Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia adalah Negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Asia, Australia, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian Selatan dan Timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian di dominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki tingkat gempa yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat gempa di Amerika Serikat (<http://www.ashoka.or.id>).

Keadaan serupa juga terjadi di Sumatera Barat, diantara 33 Provinsi di Indonesia, Sumatera Barat termasuk daerah yang paling rentan terhadap ancaman bencana gempa bumi dan bencana lainnya. Keadaan ini dipengaruhi oleh faktor alam Sumatera Barat yang dilalui lempengan Eurasia, dan deretan gunung api membuat keadaan Sumatera Barat rentan terhadap bencana. Gempa 7,9 skala richter yang terjadi 30 September 2009 telah merusak sebagian besar kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang telah mengakibatkan kerugian jiwa dan harta.

Gempa tanggal 30 September tersebut menyebabkan parah kerusakan di beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut

Satkorlak Penanggulangan Bencana, sedikitnya 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota & 4 kabupaten di Sumatera Barat, korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, korban hilang 1 orang. Jumlah kerusakan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh gempa bumi Sumatera Barat tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.1 ;

Tabel 1.1. Kerusakan Akibat Gempa Bumi Sumatera Barat Tahun 2009

Sarana dan prasarana	Berat	Sedang	Ringan
Rumah	119.005	73.733	78.802
Pendidikan	2.114	11.364	1.147
Kesehatan	235	84	66
Kantor	246	103	74
Jalan	170	82	33
Jembatan	15	41	5
Irigasi	144	153	29
Rumah Ibadah	1.331	693	464
Pasar & Yang lainnya	55	43	59

Sumber: Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumatera Barat tahun 2009

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah sarana yang rusak seperti rumah, baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat jumlahnya mencapai 271.540 unit. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari seluruh daerah Sumatera Barat yang terkena bencana gempa bumi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Barat menderita kerugian yang sangat besar. Total kerugian gempa berkekuatan 7,6 Skala Richter yang mengguncang Sumatera Barat akhir September lalu mencapai Rp 21,5 Triliun (<http://nasional.vivanews.com/news>).

Tabel 1.2. Kerusakan Perumahan Akibat Gempa Bumi Sumatera Barat Tahun 2009

No	Nama Daerah	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Jumlah
1.	Kota Padang	33.597	35.816	37.615	107.028
2.	Kota Pariaman	6.685	4.115	2.605	13.405
3.	Kota Solok	2	2	6	10
4.	Kota Padang Panjang	17	164	413	594
5.	Kab. Tanah Datar	28	115	105	248
6.	Kab. Padang Pariaman	57.931	16.291	12.945	87.167
7.	Kab. Mentawai	3	0	136	139
8.	Kab. Agam	11.796	3.797	4.353	19.946
9.	Kab. Solok	145	243	357	745
10.	Kab. Pasaman	197	13	931	1.141
11.	Kab. Pasaman Barat	3.240	3.046	2.862	9.148
12.	Kab. Pesisir Selatan	1.156	3.596	5.510	10.262
Jumlah		114.797	67.198	67.838	249.833

Sumber : BPBD Provinsi Sumatra Barat tahun 2009

Sesuai dengan UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai tindakan guna mengembalikan kondisi masyarakat setelah bencana. Seperti yang dijelaskan pada UU RI No 24 tahun 2007, BAB III tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana. Pada BAB III ini intinya pemerintah memiliki kewajiban untuk penanggulangan bencana yang terdiri dari 3 tahapan, tahapan pertama : pra bencana, kedua : tanggap darurat, ketiga: pasca bencana.

Setelah terjadinya bencana 30 September 2009 di Sumatera Barat maka telah dilakukan upaya tanggap darurat dan dilanjutkan dengan pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masih berlangsung hingga sekarang di beberapa daerah di Sumatera Barat. Daerah tersebut telah terlaksana tiga kali tahapan dan ada juga yang masih terlaksana dua

kali tahapan penyaluran dana. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak terlepas dari masalah diantaranya : lambannya penyaluran dana, ada penyalah distribusi dana gempa yang salah sasaran, banyaknya masyarakat yang tidak terdata dan lain sebagainya (Padek, 23 September 2011).

Dalam rangka pelaksanaan UU RI No. 24 Tahun 2007, Pemerintah telah melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat. Pemerintah telah menyiapkan dukungan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai sektor yang rusak akibat gempa bumi, termasuk dana stimulan bantuan pembangunan perumahan yang rusak akibat gempa bumi tersebut. Pelaksanaan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi secara langsung disalurkan dari rekening pemerintah pusat kepada rekening kelompok warga penerima bantuan. Untuk tataran daerah, pelaksanaan ini dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang berasal dari pejabat satuan perangkat daerah terkait. Untuk penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi dibantu oleh dinas Prasarana Umum (PU) di tiap daerah kota/kabupaten, yang dipimpin oleh Dinas PU Provinsi Sumatera Barat.

Kota Padang juga merupakan kota yang terkena dampak besar dari gempa 30 September 2009. Berdasarkan data yang dikeluarkan PJOK kota padang 11 kecamatan di kota Padang terkena risiko (*lihat tabel 1.3*) ;

**Tabel 1.3 : Jumlah Kerusakan Perumahan Pasca Gempa 30 September 2009
Di Kota Padang**

No	Kecamatan	Rusak Berat	Rusak Sedang	Kepala Keluarga	Jumlah Kelurahan
1	Lubuk Kilangan	635	583	1.218	7
2	Koto Tengah	1.515	1.946	3.461	13
3	Kuranji	499	1.674	2.173	9
4	Padang Barat	155	590	745	10
5	Padang Utara	56	630	686	7
6	Padang Selatan	73	629	702	10
7	Padang Timur	546	673	1.219	10
8	Nanggalo	282	620	902	6
9	Lubuk Begalung	5	1.557	1.562	15
10	Pauh	152	327	479	7
11	Bungus Teluk Kabung	290	321	611	2
TOTAL		4.208	9.550	13.758	96

Sumber : Kantor PJOK Kota Padang

Kecamatan Nanggalo merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Padang dan juga penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 tahap III. Pengucuran dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa 30 September 2009 telah dilaksanakan pada tahun 2011. Dari pelaksanaan tersebut kecamatan Naggalo tercatat sebagai salah satu kecamatan yang mengalami banyak masalah dalam proses penyaluran dananya. Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan di kantor PJOK kota Padang menunjukkan bahwa Kecamatan Nanggalo merupakan daerah yang memiliki permasalahan dalam penyaluran dana. Permasalahan ini teridentifikasi ketika ada tuntutan atau ketidak puasan masyarakat dalam hal penyaluran dana tersebut.

"Daerah yang paling banyak komplain di Kota Padang ini adalah di kecamatan Nanggalo, terutama di kelurahan Surau gadang. Bahkan ada kasus yang sudah sampai difasilitasi oleh Komnas HAM Kota Padang" (wawancara dengan kepala PJOK Kota Padang, Asmul ZA, 54 tahun, 29/12/2011).

Berdasarkan wawancara awal diatas dapat diketahui bahwa adanya warga yang tidak puas atau melakukan protes dalam proses penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahap III di kota padang. Protes tersebut dilontarkan oleh warga terhadap penanggung jawab kegiatan (PJOK) Kota Padang. Dengan adanya penyusutan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, maka warga mendatangi Prasarana Umum (PU) menyampaikan kekecewaannya. Warga menyangka adanya pemotongan dan penyalahgunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat. Seharusnya Penanggung Jawab Operasional dan Kegiatan (PJOK) yang berasal dari pejabat satuan perangkat daerah terkait memberikan keterbukaan data terhadap penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 sehingga terlepas dari kecurigaan masyarakat (Padang Ekspres, 21 September 2011).

Protes warga terhadap PJOK mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat merupakan penelitian yang terkait dari penelitian yang dilakukan oleh Edwin Refianda yang berjudul dampak gempa terhadap usaha kerajinan sulaman (Kasus Usaha Kerajinan Sulaman Yang Dikelola Oleh Perempuan Desa Naras 1 Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman). Pada intinya penelitian ini mengkaji tentang dampak gempa terhadap penyulam, dampak gempa tersebut diantaranya adalah banyaknya pengangguran, rendahnya pendapatan dan sebagainya, sehingga diharapkan kepada pemerintah dan instansi terkait agar dapat membentuk asosiasi usaha kerajinan yang diawasi langsung oleh pemerintah agar tidak terjadi kecurigaan terhadap warga masyarakat yang terkena musibah bencana alam.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nurheni yang berjudul pandangan komunitas lokal tentang fenomena bencana alam (studi kasus Kejadian Banjir Bandang Dalam Analisis Sosiologis Di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan). Pada intinya penelitian ini mengkaji tentang Interaksi antara komunitas lokal yang menimbulkan kerusakan lingkungan hutan yang mengakibatkan kerugian bagi penduduk setempat, sehingga pemerintah bekerja sama dengan aparat kepolisian sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat dipahami bahwa belum ada penelitian tentang penyaluran bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang terkena bencana, apa lagi tentang protes warga terhadap PJOK mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu untuk diteliti karena selain penelitian ini belum ada dilakukan, penelitian ini membuktikan adanya protes warga terhadap PJOK mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Protes tersebut merupakan suatu bentuk reaksi kekecewaan sosial terhadap kebijakan pemerintah yang tidak adil dalam penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi dan tidak mengikut sertakan mereka dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III, warga membentuk kelompok masyarakat (pokmas). Kelompok masyarakat (pokmas) merupakan penggerakkan

dan pesinergikan penerima dana dalam menyusun usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang berbasis komunitas di kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Kelompok masyarakat (pokmas) ini bertugas untuk memperbaiki rumah dengan kategori rusak berat dan rusak sedang.

Kelompok masyarakat ini dapat membangun atau memperbaiki rumah dengan konstruksi yang lebih aman dan tahan gempa. Tujuannya untuk memulihkan kembali tempat hunian masyarakat melalui prinsip kebersamaan, dan dapat meminimalisir timbulnya konflik antar warga dalam penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

Dari data Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kota Padang Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 disalurkan melalui tiga tahapan yaitu tahap satu, tahap dua, dan tahap tiga. Pada tahap pertama dana disalurkan kepada penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kelurahan Surau Gadang sebanyak 1.288 unit rumah rusak berat, 129 unit rumah rusak sedang. Pada tahap dua, dana disalurkan kepada penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa sebanyak 269 unit rusak berat, 406 unit rusak ringan, dan pada tahap tiga dana disalurkan sebanyak 37 unit rumah rusak berat dan 260 unit rumah rusak sedang.

Di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 mengalami masalah yaitu adanya protes dari warga kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi

dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat (Singgalang, 30 Juni 2011).

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah **“Mengapa warga protes kepada PJOK Kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan protes warga terhadap penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) Kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penyebab warga memprotes penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.
2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk protes warga kepada penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaatnya antara lain sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang protes warga terhadap penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan pihak-pihak lain dalam mengelola konflik warga yang protes terhadap PJOK kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Gerakan sosial dan konflik.

Istilah gerakan sosial pertama kali digunakan oleh Lornz Von Stein, ilmuwan sosial Jerman pada tahun 1842 yang menyatakan bahwa gerakan sosial dipandang sebagai penyatuan orang-orang yang tidak berkuasa yang tidak bersatu untuk mencapai suatu tujuan sehingga masyarakat mampu mengotrol pemerintah.

Menurut Mario Diani (dalam porta dan diani 2006), gerakan sosial merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari suatu mekanisme yang digunakan oleh orang-orang untuk melakukan tindakan kolektif (bersama) untuk menentang pihak tertentu menuntut atau mengadakan perubahan, yang dihubungkan dengan jaringan informal dan memiliki identitas bersama.

Menurut Smelser (1962), Gerakan sosial adalah adanya frasa (rasa) perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah baik dalam aspek, maupun unsur yang terkait didalamnya.

1.5.2 Pengertian Protes

Protes merupakan kata yang diadopsi dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia. Secara epistimologis, protes berasal dari *protest* yang berarti : *ks.* 1. Memprotes, 2. Menentang, 3. Sanggahan. *Protes* sendiri merupakan bentuk *adjective* dari *protest* yang berarti : *kb.* 1. Protes, sanggahan, 2. Pembangkangan, menyanggah (Echols, 2003:481).

Protes (n) merupakan pernyataan tidak menyetujui, menentang, menyangkal, dan sebagainya : sebagian orang melancarkan kecaman pedas dan keras. Memprotes (v) menyatakan tidak setuju, menyangkal, dan sebagainya ; menentang : mereka melancarkan aksi mogok makan untuk penahanan tanpa peradilan. Pemprotes (n) orang yang pemprotes (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:406).

Menurut John Lofland (2003:2), protes merupakan kata benda dan kata kerja yang berarti ; pernyataan pendapat secara beramai-ramai dan biasanya berupa pembangkangan ; keluhan, keberatan, atau ungkapan keengganan terhadap suatu gagasan atau tindakan ; ekspresi penolakan secara lugas ; deklarasi oleh pihak tertentu sebelum atau pada saat melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang dianggap ilegal, pengingkaran terhadap tuntutan yang dibebankan, menuntut hak dan melakukan klaim untuk menunjukkan bahwa tindakannya tidak dilakukan secara sukarela; menyatakan suatu hal secara terbuka dimuka umum; melakukan deklarasi penolakan tertulis secara formal; berjanji untuk melakukan penolakan secara beramai-ramai; mendudukan masalah pada proposisinya.

Menurut Bert Klandermans (2005:2), Protes merupakan dinamika sosial yang melakukan aksi-aksi kolektif baik berupa pemogokan maupun demonstrasi/protes atau petitis yang mampu berpartisipasi di dalam gerakan sosial.

Menurut Smelser (1962), protes merupakan perilaku kolektif yang berhubungan dengan gerakan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud adalah adanya frasa (rasa) perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah baik dalam aspek, maupun unsur yang terkait didalamnya.

1.5.3 Perspektif Sosiologis

1.5.3.1 Protes Menurut Perspektif Sosiologis

Dalam penelitian protes warga terhadap PJOK (penanggung jawab operasional kegiatan) Kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat, maka pertentangan yang dilakukan adalah pertentangan antara yang membuat kebijakan dengan yang melaksanakan kebijakan (konflik otoritas). Pertentangan antara warga kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo Kota Padang dengan PJOK. Warga melakukan aksi kolektif berupa protes kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Aksi kolektif berupa protes tersebut terjadi karena warga yang memprotes kepada PJOK merasa tidak adil dalam pembagian dan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat pada tahap III, sehingga warga kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo Kota Padang melakukan aksi protes terhadap Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Protes merupakan aksi kolektif yang dikemukakan oleh Charles Tilly (1978:17) yang menyatakan bahwa aksi kolektif merupakan semua peristiwa berkumpulnya orang-orang dengan sumber daya bersama (secara mandiri), mencakup usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Protes terjadi karena adanya ketidakseimbangan kepentingan antara penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). Dengan adanya protes tersebut maka muncullah aksi kolektif berupa ketegangan-ketegangan struktural. Ketegangan tersebut akan mencapai puncaknya dan meledak, sehingga menimbulkan konflik.

1.5.4.2 Teori Protes Neil J Smelser

Menurut Smelser (1962), protes merupakan perilaku kolektif yang berhubungan dengan gerakan sosial. Gerakan sosial yang dimaksud adalah adanya frasa (rasa) perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah baik dalam aspek, maupun unsur yang terkait didalamnya. Masyarakat berperilaku kolektif karena ada sesuatu yang salah dalam lingkungan sosialnya. Menurut Smelser, determinan-determinan yang dapat menimbulkan tingkah laku kolektif (*collective behavior*) yang memunculkan perubahan adalah :

1. Kondusifitas Struktural

Menurut Smelser (1962), proses terjadinya perilaku kolektif itu dimulai dari adanya persoalan dalam struktur sosial. Kondusifitas struktural ini merupakan

embrio yang membuka peluang bagi terjadinya perilaku kolektif. Kondisi struktural ini terjadi karena adanya terbuka akses kepada kelembagaan sebuah system dan adanya konfigurasi kekuasaan diantara para aktor didalam system tersebut.

2. Ketegangan Struktural

Menurut Smelser (1962) ketegangan struktural merupakan mekanisme pergerakan yang berpartisipasi untuk melakukan aksi kolektif. Ketegangan struktural ini juga merupakan penghubung aksi kolektif secara formal maupun informal. ketegangan struktural muncul karena adanya pergerakan sosial yang melebur dalam aksi kolektif yang dapat menyebabkan gerakan sosial. Gerakan sosial tersebut diantaranya adalah kelompok sosial.

3. Proses Freming

Menurut Smelser (1962) Proses freming merupakan keyakinan kolektif yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok sosial yang dapat tumbuh dan menyebarkan kepercayaan umum yang terkait didalamnya.

Dalam penelitian protes warga terhadap PJOK Kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat. Maka, penelitian ini hanya memfokuskan pada determinan yang kedua yaitu : ketegangan struktural.

1.5.4.3. Teori ketegangan struktural

Menurut Zald, McAdam, McCarthy Teori ketegangan struktural juga bisa disebut sebagai teori struktur mobilisasi karena ketegangan sosial merupakan

kendaraan kolektif baik formal maupun informal. Dengan kendaraan ini mobilisasi dapat dilakukan secara bersama karena adanya pendukung yang dapat dikerahkan, hal ini juga disebut sebagai penyebab terjadinya gerakan. Ketegangan masyarakat merupakan adanya pertentangan norma-norma hukum, nilai-nilai, keyakinan antar warga. Tujuannya adalah untuk mencari lokasi-lokasi didalam masyarakat untuk dapat dimobilisasi. Struktur mobilisasi dapat berupa : jaringan formal dan informal, organisasi, kelompok sosial, taktik gerakan (Situmorrang W,A. 2007 :7).

Menurut Smelser (1962), ketegangan struktural adalah tekanan-tekanan yang dilakukan kelompok sosial dalam aksi kolektifnya. Aksi kolektif muncul karena adanya sesuatu yang salah dalam lingkungan sosialnya sehingga ketegangan struktural itu tidak sistematis. Ketegangan struktural terjadi karena ketegangan itu dipengaruhi oleh tidak pernah selesainya persoalan antara warga dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009. Hal ini terjadi karena adanya aksi kolektif dan pendukung yang dapat menyebabkan gerakan sosial. Gerakan sosial tersebut diantaranya adalah kelompok sosial. Yang mana adanya kelompok warga yang melakukan aksi kolektif berupa protes yang dilakukan oleh warga kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo Kota Padang terhadap penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

I.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini untuk memahami realitas sosial sebagai realitas subjektif yang memberikan tekanan terbuka tentang kehidupan sosial. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa data yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati di lapangan (Moleong, 2003 : 3). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati, yang di arahkan pada latar induvidu tersebut secara menyeluruh (*holistik*) dan utuh.

Pendekatan kualitatif sangat sesuai untuk memahami realitas sosial yang dibangun oleh manusia. Alasan memakai metode penelitian kualitatif juga melalui pertimbangan teoritis dimana peneliti mempunyai pemahaman khusus tentang realita sosial dan perilaku manusia adalah pertama, perilaku manusia dikarenakan pikirannya terhadap sesuatu atau mengacu pada norma dan nilai tertentu sebagai dasar bertindak. Kedua, kepedulian peneliti adalah untuk mengetahui realitas soial. Ketiga, peneliti berpendapat bahwa realitas sosial tidak bisa dikuantifikasikan disebabkan oleh realitas sosial adalah subjektif/ intersubjektif dan dikonstruksi oleh manusia. Keempat, Realitas sosial tidak bisa disamakan dengan benda karena ada pemahaman bahwa realitas sosial merupakan realitas subjektif/intersubyektif, bukan realitas yang objektif yang berada di luar diri manusia yang berkembang dengan hukum-hukumnya sendiri (Afrizal, 2005 : 18).

Jadi dengan pendekatan ini, peneliti dapat meningkatkan pemahaman terhadap cara subyek memandang dan menginterpretasikan hidupnya karena itu berhubungan dengan subyek dan dunia subyek itu sendiri.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan suatu keadaan melalui data-data yang diperoleh di lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian (Moleong, 2000 : 6). Penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap-sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

Adapun tujuan dari penelitian yang bertipe deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena Tipe penelitian ini dipilih karena peneliti meneliti bagaimana protes warga terhadap PJOK Kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat, mulai dari faktor yang menyebabkan warga memprotes PJOK mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009, dan apa saja bentuk protes yang dilakukan warga terhadap PJOK mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 1998). Informan penelitian juga diartikan sebagai orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti (Spradley dalam Afrizal, 1997 : 35-36). Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah orang-orang yang dipilih untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi sesuai dengan kepentingan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

Terdapat dua mekanisme untuk mencari informan penelitian yaitu mekanisme disengaja (*purposive sampling*), dimana informan dicari dan sudah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti sudah mengetahui identitas orang yang menjadi informan. Mekanisme kedua adalah mekanisme bola salju (*snowballing*) yaitu mencari informan apabila si peneliti tidak mengetahui siapa saja yang dapat dia wawancarai untuk mendapatkan informasi. Cara mendapatkan para informan adalah dari informan yang lain (Afrizal, 2005 : 66). Pada penelitian ini, penulis menggunakan mekanisme *purposive sampling* dalam mencari informan. Informan dengan mekanisme *purposive* yang dimaksud adalah warga kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo yang memprotes kepada PJOK Kota Padang sebagai penanggung jawab dalam penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat pada tahap III .

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 8 orang dimana mewakili orang yang terlibat dalam melakukan protes kepada PJOK Kota Padang. Informasi

dari 8 orang ini sudah mengalami kejenuhan data, maka informasi yang didapat telah cukup. Maksudnya, setiap pertanyaan penelitian telah dijawab sama dengan informan lain maka data yang didapat telah jenuh.

1.6.3 Data yang Diambil

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian kualitatif akan menghasilkan data kualitatif. Maka data terkumpul berupa kata-kata atau gambar seperti transkrip interview, catatan lapangan, dokumen personal dan catatan resmi lainnya. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang digunakan dalam penelitian ini. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan saat proses penelitian berlangsung dan data ini diambil melalui proses wawancara secara mendalam (Wahyu Pramono, 2002 : 52). Data primer yang diambil berasal dari warga kelurahan Surau Gadang yang memprotes kepada PJOK Kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat pada tahap III. Selain sumber data primer juga diambil data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan alat adalah benda yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data utamanya adalah wawancara mendalam. Alat yang

digunakan adalah tape recorder, alat tulis seperti pena dan kertas (Wahyu Pramono, 2002 : 52).

Pada penelitian ini penulis memakai teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam disebut juga wawancara tidak berstruktur. Wawancara tersebut mengalir begitu saja (Afrizal, 2005 : 69). Maka dapat dinyatakan bahwa pengertian wawancara mendalam adalah tidak berstruktur, dilakukan berulang kali, dengan informan, dan interaksi secara langsung dan dilakukan dalam suasana yang fleksibel dan nyaman mungkin (tidak boleh mengganggu pekerjaan informan). Pewawancara bebas menanyakan berbagai hal kepada informan dan informan menjawab pertanyaan sesuai dengan yang mereka inginkan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang protes warga kelurahan Surau Gadang terhadap PJOK Kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat pada tahap III. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah tape recorder, pena, kertas dan panca indera peneliti sendiri.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditunjuk melalui mekanisme *purposive sampling* seperti yang dijelaskan pada bagian terdahulu, antara lain warga kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo yang memprotes PJOK Kota Padang. PJOK tersebut berfungsi sebagai penanggung jawab dalam penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

gempa 30 September 2009 Sumatera Barat. Alasan memilih informan ini dikarenakan warga kelurahan Surau Gadang secara langsung yang melakukan aksi protesnya kepada PJOK Kota Padang. Wawancara dilakukan agar dapat mendeskripsikan protes warga terhadap PJOK mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah individu. Individu yang dimaksud disini adalah warga yang melakukan protes kepada PJOK Kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data, supaya data mudah dibaca dan ditafsirkan oleh peneliti. Menurut Moleong, analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman, dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan, serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami (Moleong, 2002 : 103).

Analisis data dilakukan mulai dari awal sampai akhir penelitian, dimana data sudah dapat di katakan jenuh. Data yang dikumpulkan dari lapangan diklasifikasian secara sistematis dan dianalisis menurut kemampuan interpretasi peneliti dengan dukungan data primer dan data sekunder yang ada berdasarkan kajian teoritis yang relevan.

Agar data informasi yang diperoleh dari lapangan lebih akurat, maka dilakukan juga teknik triangulasi (*check and recheck*), yaitu pertanyaan yang diajukan merupakan pemeriksaan kembali atas kebenaran jawaban yang telah di dapat dari informan, ditambah dengan pertanyaan yang bersifat melengkapi. Teknik triangulasi yang dilakukan adalah dengan menanyakan pertanyaan yang sama pada sumber yang lain atau pihak lain. Dalam hal ini pengecekan peneliti lakukan pada pihak yang tidak melakukan protes terhadap Penanggung Jawab Operasional dan Kegiatan (PJOK) di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data mengandung arti bahwa aktivitas-aktivitas seorang peneliti dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok data tersebut (Wahyu Pramono, 2002 : 14). Analisis data juga disebut proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil lapangan, dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami (Moleong, 1998 : 103).

Dengan demikian analisis data adalah pengujian sistematis terhadap data. Data diuji sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Pengujian sistematis dilakukan untuk menentukan bahagian-bahagian itu dengan cara mengkategorikan data. Mengkategorikan berarti mengelompokkan data yang berarti sekaligus menyamakan. Untuk mengkategorisasikan data diperlukan ukuran atau patokan dan dasar untuk mengelompokkan data. Analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga kesimpulannya ditarik pada akhir penelitian.

Menurut Miles dan Huberman (1992 : 16-19) Terdapat 3 langkah yang dilakukan dalam analisis data : Pertama, Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data. Reduksi data juga merupakan pemusatan perhatian (fokus pada permasalahan) dan pengabstrakan serta transformasi data dari catatan lapangan (data mentah). Catatan lapangan harus detail. Untuk mencapai tujuan reduksi data maka harus dilakukan kodifikasi (menandai mana data yang penting dan yang tidak penting), ringkasan dan mencari tema-tema informasi. Kedua data merupakan penyusunan data dalam bentuk teks naratif, dan diagram-diagram. Berarti menyusun data agar dapat membuat kesimpulan. Cara menyusunnya adalah dengan alternatif cara membuat matriks, buat narasi berbentuk deskriptif, dan sajikan dalam bentuk bagan dan grafik. Ketiga menarik kesimpulan dan verifikasi. Merupakan tahap akhir analisis data yang berarti memaknai data yang didapat. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Tahap ini peneliti juga menguji keabsahan atau kevalidan/mengecek kebenaran hasil interpretasi. Caranya adalah dengan meninjau ulang reduksi data dan penyajian data serta melakukan triangulasi dan observasi. Dengan demikian, untuk kevalidan penelitian, maka penulis menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman di atas.

1.6.7 Proses Penelitian

Proses penelitian awalnya dimulai dengan mengurus surat izin penelitian di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Surat izin ini digunakan untuk mengurus permohonan izin di Kesbangpol Kota Padang. Peneliti meminta surat permohonan untuk penelitian ke Kesbangpol pada tanggal 23 Desember 2011. Surat izin tersebut didapatkan pada tanggal 27 Desember 2012. Surat dari Kesbangpol digunakan untuk berbagai keperluan seperti meminta surat rekomendasi dari Kecamatan untuk Kelurahan.

Pada tanggal 28 Desember 2011 peneliti mendatangi kantor PJOK Kota Padang dan memasukkan surat izin penelitian dari Fakultas dan Kesbangpol. Pada tanggal 29 Desember 2011 peneliti menemui kepala PJOK Kota Padang untuk meminta data dan memastikan kecamatan dan kelurahan mana yang banyak mengalami protes tentang penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat pada tahap III. Setelah kepala PJOK memberi data dan memberikan informasi tentang lokasi, ternyata kecamatan Nanggalo kelurahan Surau Gadang yang banyak protes kepada PJOK.

Pada tanggal 31 Desember 2012, peneliti kembali lagi menemui Kepala PJOK Kota Padang untuk mewawancarainya dan mengklarifikasi mengenai protes warga terhadap penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat. Sebelumnya, peneliti membuat janji dengan informan terlebih dahulu agar dapat menyediakan waktunya untuk diwawancara sehingga wawancara akan lebih nyaman dilakukan. Sehingga peneliti memutuskan mewawancarai terlebih dahulu orang yang mudah dihubungi agar dapat membuat janji dengan informan yang lain.

Pada tanggal 8 Januari 2012 peneliti mendatangi kantor Kecamatan Nanggalo dan memasukan surat rekomendasi penelitian. Setelah surat itu dikeluarkan Pada tanggal 12 Januari 2012, peneliti meminta data kependudukan Kecamatan Nanggalo dan meminta rekomendasi penelitian untuk kelurahan Surau Gadang serta menanyakan langsung kapan peneliti bisa melakukan wawancara dengan informan terkait.

Pada tanggal 9 Januari 2012, peneliti kembali mewawancarai kepala PJOK Kota Padang untuk mengklarifikasi data wawancara sebelumnya yang dianggap kurang dan sekaligus mendapatkan data sekunder berupa dokumentasi dan data-data kerusakan gempa. Disini peneliti juga mendapatkan petunjuk teknis Rehabilitasi Rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat. sehingga peneliti juga melakukan wawancara dengan sekretaris PJOK Kota Padang untuk melengkapi data tentang protes penerima dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Peneliti juga mendapatkan informasi tentang adanya kasus warga

kelurahan Surau Gadang dengan PJOK tentang penyaluran dana gempa tahap III yang dimediasi oleh Kom Nas Ham Kota Padang.

Pada tanggal 13 Januari 2012 wawancara dilakukan dengan Kasubag Pengaduan Masyarakat Kom Nas Ham Kota Padang. Kasubag Pengaduan Masyarakat ini mengetahui proses dari awal sampai selesainya mediasi yang dilakukan antara warga Surau Gadang dengan PJOK Kota Padang. Pada tanggal 14 Januari 2012, wawancara dilakukan dengan kepala Lurah Surau Gadang dimana kepala Lurah sangat mengetahui masalah warga yang terjadi dikelurahannya. Ketika itu peneliti juga mewawancarai sekretaris lurah dan meminta data penduduk kelurahan.

Pada tanggal 2 Februari 2012 wawancara dilakukan dengan Fasilitator kelurahan Surau Gadang. Fasilitator ini yang berfungsi sebagai mendata dan memvalidasi rumah warga yang rusak akibat gempa. Pada tanggal 5 Februari 2012 wawancara dilakukan dengan warga yang protes kepada PJOK Kota Padang. Hal ini dapat mengetahui masalah yang ada dalam penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

Proses penelitian ini dapat dikatakan berjalan lama, hal ini dikarenakan informan penelitian sulit dicari keberadaannya dan jika dapat dihubungi, harus dibuat janji terlebih dahulu dan disesuaikan dengan waktu yang menurut informan baik.

1.6.8 Definisi Operasional

Protes: pernyataan yang tidak menyetujui, menentang, menyangkal, dan sebagainya : orang yang melancarkan kecaman pedas dan keras.

Warga: penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara itu.

Penerima dana: orang yang menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan pada saat bencana.

Rehabilitasi : perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi : pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Pasca: bentuk terikat sesudah sesuatu terjadi.

Gempa: guncangan, gerakan bumi. Geo ; peristiwa alam berupa getaran atau gerakan bergelombang pada kulit bumi yang ditimbulkan oleh tenaga asal dalam ; gempa bumi baik yang disebabkan oleh pergeseran tanah (tektonik) dan yang disebabkan oleh gunung berapi (vulkanik).

PJOK: penanggung jawab operasional kegiatan

Konflik: pertentangan kepentingan.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan, daerah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo kota Padang. Peneliti memilih Kelurahan Surau Gadang sebagai lokasi penelitian karena di Kelurahan ini termasuk daerah yang banyak warganya melakukan protes kepada Penanggung Jawab Operasional dan Kegiatan (PJOK) kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat pada tahap III.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan semenjak penulisan proposal ini dimulai pada bulan September 2011.

Tabel 1.4 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2011						Tahun 2012				
		Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai
1.	Survei Awal											
2.	Tor Penelitian											
3.	SK Pembimbing											
4.	Bimbingan											
5.	Seminar Proposal											
6.	Perbaikan Proposal											
7.	Penelitian											
8.	Analisis Data											
9.	Ujian Skripsi											

BAB II

DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

2.1. Deskripsi Kecamatan Nanggalo

2.1.1 Keadaan Dan Kondisi Geografis Kecamatan Nanggalo

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Kecamatan Nanggalo Sebelah Utara berbatas dengan kecamatan Koto Tengah, Sebelah Selatan berbatas dengan kecamatan Padang Utara, Sebelah Timur berbatas dengan kecamatan Kuranji dan Sebelah Barat berbatas dengan kecamatan Padang Utara. (*Lihat Gambar 2.1*).



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Nanggalo
Sumber : Data BPS Kota Padang Tahun 2010

Kecamatan Nanggalo terletak pada 0° 58° LS s/d 100° BT. Daerah ini berada pada ketinggian ketinggian daerah 3-8 meter diatas permukaan laut dengan temperatur 22°C-31,7°C. Kecamatan Nanggalo terletak di daerah yang cukup stretegis dengan luas daerahnya $\pm 8,07 \text{ Km}^2$. Curah hujan dan jumlah hari hujannya rata-rata 3884,88 mm/bulan.

Kecamatan ini memiliki 6 kelurahan, diantaranya kelurahan Tabing Bandar Gadang, kelurahan Gurun Lawas, kelurahan Kampung Olo, kelurahan Kampung Lapai, kelurahan Kurao Pagang dan kelurahan Surau Gadang. Secara rinci dapat kita lihat luas daerah menurut kelurahan pada *tabel 2.1*.

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kelurahan

No.	Nama Kelurahan	Luas (KM ²)
1.	Tabing Bandar Gadang	0,91
2.	Gurun Lawas	0,85
3.	Kampung Olo	0,57
4.	Kampung Lapai	0,61
5.	Surau Gadang	2,28
6.	Kurao Pagang	2,85
Jumlah		8,07

Sumber: Data BPS Kota Padang Tahun 2010

Menurut data BPS Kota Padang, kelurahan Surau Gadang memiliki luas wilayah $\pm 2,28 \text{ Km}^2$. Kelurahan ini merupakan kelurahan terluas kedua diantara enam kelurahan yang ada di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Secara administratif, kelurahan Surau Gadang Sebelah Utara berbatas dengan kelurahan Kurao Pagang. Sebelah Selatan berbatas dengan kelurahan Gurun Lawas. Sebelah Barat berbatas dengan kelurahan Kampung Olo. Dan Sebelah Timur berbatas

dengan kelurahan Kurao Pagang. Kelurahan Surau Gadang berkeadaan alam dengan ketinggian 3,47 meter dari dasar permukaan laut.

Jarak antara kelurahan Surau Gadang dengan Ibukota kecamatan Nanggalo adalah 1 km. Jarak kelurahan ini dari pusat kota Padang adalah 4 km. Jarak kelurahan Surau Gadang dari dari pusat pemerintahan provinsi adalah 3.50 km. Kelurahan ini terletak di tengah kota, tepatnya dipinggir pasar Siteba kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Dari Pasar Raya Padang, agar sampai ke kelurahan ini kita bisa naik angkutan kota dengan jurusan Siteba. Angkutan kota ini berwarna biru muda. Jika dari pasar raya Padang, maka kita akan melintasi jalan Proklamasi, kemudian kita akan melintasi daerah Jati, sampai Alai, Gunung Pangilun menuju pasar Siteba. Kemudian kita belok kiri dan sampailah di kelurahan Surau Gadang. Waktu tempuh dari Pasar Raya Padang dengan menggunakan angkutan kota $\pm$ 10 menit.

Transportasi umum dikelurahan Surau Gadang ini bisa dikatan sangat lancar. Ini dilihat dari banyaknya angkutan kota yang beroperasi ke kelurahan ini. Setiap harinya angkutan kota beroperasi setiap 5 menit sekali. Menurut warga, banyaknya angkutan kota beroperasi dikelurahan ini dipengaruhi oleh perumahan dan pasar yang ada di kelurahan ini.

2.2 Keadaan Demografis Kelurahan

2.2.1 Kependudukan

Secara demografis kelurahan Surau Gadang mempunyai penduduk sebanyak 23.341 jiwa yang terdiri dari 11.112 jiwa laki-laki dan 12.229 jiwa

perempuan. Dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak 5.588 KK, 22 RW dan 97 RT. Kelurahan Surau Gadang merupakan kelurahan yang paling banyak Penduduk, RT, RW dan KK nya dari 6 kelurahan yang ada di kecamatan Nanggalo. Dapat kita lihat pada *tabel 2.3*

Tabel 2.3 Jumlah RT, RW, KK dan Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan

No.	Kelurahan	RT	RW	KK	Penduduk
1.	Tabing Bandar gadang	14	3	849	3.626
2.	Gurun Lawas	11	3	507	2.368
3.	Kampung Olo	18	6	2.013	7.373
4.	Kampung Lapai	42	8	3.016	11.696
5.	Surau Gadang	97	22	5.588	23.341
6.	Kurao Pagang	31	6	2.714	11.447
Jumlah		213	48	14.687	59.851

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2010

Berdasarkan data BPS Kota Padang Tahun 2010, penduduk kelurahan Surau Gadang menurut kelompok umur cukup beragam. Pada umumnya penduduk kelurahan Surau Gadang berusia produktif. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan kelompok umur kurang produktif. Jumlah penduduk yang masuk kedalam kelompok produktif (terdiri dari kelompok umur 15-64 tahun) sebanyak 27.220 orang. Kelompok umur belum produktif (terdiri dari kelompok umur 0-14 tahun) sebanyak 5461 orang. Sedangkan kelompok umur kurang produktif (terdiri dari kelompok umur 65 tahun keatas) di kelurahan Surau Gadang ini sebanyak 1772 orang. Untuk lebih lengkapnya berikut disajikan data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur pada *tabel 2.4*.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

No	Kelompok umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	1.221	1.023	2.244
2.	5-9	857	988	1.845
3.	10-14	679	693	1.372
4.	15-19	576	875	1.451
5.	20-24	774	1.173	1.947
6.	25-29	1.102	1.287	2.389
7.	30-34	1.391	1.015	2.406
8.	35-39	965	880	1.845
9.	40-44	702	496	1.198
10.	45-49	402	765	1.167
11.	50-54	616	547	1.163
12.	55-59	900	1.038	1.938
13.	60-64	277	324	601
14.	65-69	301	579	880
15.	70-74	172	243	415
16.	75+	176	301	477
Jumlah		11.112	12.229	23.341

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2010

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa di Kelurahan Surau Gadang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pada umumnya penduduk kelurahan Surau Gadang ini beragama Islam yaitu sebanyak 23.112 orang. Beragama Kristen/Protestan 229 orang. Penduduk asli di kelurahan ini merupakan masyarakat Minangkabau yang terdiri dari 5 suku, yaitu Suku Tanjung, Suku Melayu, Suku Jambak, Suku Koto Piliang, dan Suku Chaniago.

2.2.2 Mata Pencarian Penduduk

Masyarakat Kelurahan Surau Gadang pada umumnya bermata pencarian sebagai PNS. Selain bekerja sebagai PNS, ada juga yang berkerja sebagai pensiunan, wiraswasta, karyawan swasta, ABRI, tukang/buruh, jasa, petani dan nelayan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *tabel 2.5*.

Tabel 2.5 Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (persen)
1.	PNS	3.679
2.	Pensiunan	1832
3.	Wiraswasta	832
4.	Karyawan Swasta	465
5.	ABRI	367
6.	Tukang/Buruh	363
7.	Jasa	125
8.	Petani	65
9.	Nelayan	9

Sumber : Data Dasar Profil Kelurahan Surau Gadang Tahun 2010

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa mata pencarian yang paling banyak dilakukan masyarakat kelurahan Surau Gadang adalah PNS. Jumlah PNS berdasarkan mata pencarian di kelurahan Surau Gadang sebanyak 3.679 orang. Mata pencarian yang sedikit dilakukan oleh warga kelurahan Surau Gadang adalah nelayan. Jumlah nelayan berdasarkan mata pencarian di kelurahan Surau Gadang sebanyak 9 orang.

2.2.3 Sarana Pendidikan Dan Keagamaan

Secara umum pendidikan di Kelurahan Surau Gadang cukup bagus. Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Surau Gadang adalah sebanyak 21 buah. TK 7 buah, SD 9 buah (7 buah SD Negeri dan 2 buah SD Swasta), SMP 2 buah (1 buah SMP Negeri dan 1 buah SMP Swasta), SLTA swasta 1 buah dan 2 buah Perguruan Tinggi Swasta.

Penduduk kelurahan Surau Gadang pada umumnya beragama Islam, dan sebagian laginya beragama Kristen dan Katolik. Sarana keagamaan di kelurahan Surau Gadang ini terdapat 15 buah mesjid dan 6 buah mushala sebagai sarana

beribadah. Selain tempat beribadah, sarana ini juga dilakukan untuk pengajian umum, pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, pengajian remaja, yasinan dan juga tempat memperdalam ilmu agama. Di kelurahan ini juga terdapat lembaga keagamaan seperti TPA, TPSA dan kondisi kematian.

2.2.4 Sarana Dan Prasarana Sosial

1. Sarana Pendidikan : 7 buah Taman Kanak-Kanak, 9 buah Sekolah Dasar, 2 buah Sekolah Menengah Pertama, 1 buah Sekolah Menengah Atas dan 2 buah Perguruan Tinggi.
2. Sarana Kesehatan : 1 buah Puskesmas, 1 buah Puskesmas Keliling, 14 buah praktek dokter, 19 buah praktek bidan, 26 buah posyandu dan 9 buah toko obat.
3. Sarana Ekonomi : Pasar 1 unit, Toko/Kios 335 unit, Koperasi 4 unit, BANK 10 unit, Sawah seluas 10 ha dan Ladang seluas 3 ha.
4. Sarana Olah Raga : Lapangan Bola Kaki 2 buah, Lapangan Bola Volly 6 buah, Lapangan Bulu Tangkis 7 buah, Lapangan Takraw 5 buah dan Lapangan Futsal 1 buah.
5. Sarana Keagamaan : Masjid 16 buah dan Mushola 6 buah, TPA 10 buah dan 8 buah MDA.

Kelurahan Surau Gadang salah satu daerah yang mudah dicapai dari pusat Kota Padang. Untuk sampai ke lokasi ini dari pusat Kota hanya membutuhkan waktu 15 Menit dengan menggunakan kendaraan pribadi (roda 2 dan roda 4).

2.2.5 Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat di kelurahan Surau Gadang sangat bagus. Pada umumnya masyarakat disini sudah memiliki masing-masing pekerjaan yang sebagian besar pekerjaannya sebagai PNS dan Pensiunan. Kelurahan ini terletak dilokasi yang strategis dan dekat dengan pasar sehingga hubungan Interaksi sesama masyarakat terjalin dengan baik.

Kelompok kekerabatan yang terdapat didalam Kelurahan Surau Gadang sama dengan bentuk masyarakat Minangkabau lainnya yakni terlihat dalam paruik yaitu kesatuan keluarga luas matrilineal. Paruik berasal dari kata “perut” atau kandungan ini berarti orang yang dianggap itu berasal dari atau dilahirkan oleh seorang ibu yang sama. Pemimpin dari paruik adalah mamak yang diangkat dari laki-laki tertua dari seluruh anggota paruik terhimpun, dikelompokkan dalam sebuah rumah adat yang disebut rumah gadang. Gabungan dari beberapa kaum disebut suku. Suku dikepalai oleh seorang tuo suku yang bergelar “datuak” (penghulu). Antar warga sepasukuan tidak dibenarkan kawin. Suku yang terdapat dikelurahan Surau Gadang terdiri dari suku Tanjung, Melayu, Caniago, Jambak.

2.3 Data Rehabilitasi Dan Rekonstruksi di Kelurahan

2.3.1 Data Kerusakan Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat Tahap III

Gempa 30 September 2009 ini sudah menyebabkan kerusakan bangunan di kelurahan Surau Gadang. Adapun kriteria kerusakan tersebut terdiri atas rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat *tabel 2.6* ;

Tabel 2.6 Data Kerusakan Perumahan Di Kelurahan Surau Gadang Pasca Gempa 30 September 2009 Tahap III

No.	Nama Kelurahan	Rusak Berat	Rusak Sedang	KK	Jumlah Dana
1.	Tabing Gadang	6	88	94	Rp. 970.000.000
2.	Gurun Laweh	2	54	56	Rp. 570.000.000
3.	Kurao Panjang	5	305	310	Rp. 3.125.000.000
4.	Kampung Olo	11	184	195	Rp. 2.005.000.000
5.	Kampung Lapai	0	42	42	Rp. 420.000.000
6.	Surau Gadang	37	260	297	Rp. 3.155.000.000
TOTAL		61	933	994	Rp.10.245.000.000

Sumber : Data PJOK RR Kota Padang Tahun 2011

Berdasarkan data kerusakan perumahan PJOK Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Tahun 2011, perumahan rusak berat maupun perumahan rusak sedang yang ada di kelurahan Surau Gadang menduduki tingkat yang banyak mengalami kerusakanya dari 6 kelurahan di kecamatan Nanggalo. Jumlah dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang disalurkan oleh pemerintah kepada warga Surau Gadang sebesar Rp. 3.155.000.000. Dana ini sudah disalurkan oleh pemerintah kepada warga kelurahan Surau Gadang bulan Januari 2011.

2.3.2 Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan RR Di Kelurahan

Agar pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sektor Perumahan dapat berjalan secara efektif, diperlukan dukungan pada tingkat nagari

yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (Pokmas). Pokmas berfungsi membantu efektifitas dan efesinsi pelaksanaan perbaikan rumah yang rusak dan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi Perumahan. Keanggotaan Pokmas Perumahan terdiri dari Ketua (Sekaligus berperan sebagai Koordinator), Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Pokmas Perumahan ini terdiri dari 20 KK (Kepala Keluarga) korban gempa bumi dalam satu Nagari.

Dalam pelaksanaannya Pokmas didampingi oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Fasilitator. TPM dibentuk oleh Camat bersama-sama Walinagari/Lurah. TPM terdiri dari empat anggota. Pertama, satu orang unsur Kecamatan. Kedua, satu orang Tokoh Masyarakat/Walinagari.Lurah. ketiga, satu orang dari masyarakat yang memahami dan memiliki pengetahuan teknis pembangunan rumah. Keempat, satu orang unsur POLSEK/Koramil setempat, yang berfungsi untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor Perumahan. Selain dari TPM ada juga Tim Fasilitator yang terdiri dari 2 orang (Fasilitator teknik dan Fasilitator non teknik) yang bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap minimal 80 rumah/KK (minimal 4 Pokmas Perumahan). Fasilitator dikelola, difasilitasi dan dikendalikan oleh PJOK Kabupaten/Kota. Tugas pokok Tim Fasilitator ini melakukan validasi kerusakan rumah dan mendata jumlah jiwa penghuni rumah untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi Perumahan. Di kelurahan Surau Gadang terdapat beberapa jumlah fasilitator dan Pokmas. Untuk lebih jelasnya lihat *tabel 2.7*;

Tabel 2.7 Data Fasilitator dan Pokmas Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Fasilitator	Jumlah Pokmas
1.	Tabing Olo Gadang	2	4
2.	Gurun Laweh	2	3
3.	Kurao Pagang	6	16
4.	Kampung Olo	6	9
5.	Kampung Lapai	2	2
6.	Surau Gadang	6	15
Jumlah		24	49

Sumber : Data PJOK RR Kota Padang Tahun 2011

Dari data diatas dapat kita lihat, bahwa di kelurahan Surau Gadang memiliki banyak fasilitator. Di kelurahan Surau Gadang memiliki 6 fasilitator. Menurut Sekretaris PJOK Kota Padang (Rani Ahmad Yani, 25 tahun) di kelurahan Surau Gadang terdapat 3 pasang fasilitator, yaitu 3 fasilitator teknik dan 3 pasilitator non teknik.

Begitu juga dengan Kelompok Masyarakatnya, kelurahan Surau Gadang memiliki junlah Pokmas nomor dua paling banyak dibandingkan dengan jumlah Pokmas yang ada di kelurahan Kurao Pagang. Jumlah Pokmas Surau Gadang sebanyak 15 Pokmas, sedangkan di kelurahan Kurao Pagang terdapat 16 Pokmas. Jumlah Pokmas yang paling sedikit di kelurahan ini adalah terdapat di kelurahan Kampung Lapai. Di kampung Lapai hanya memiliki 2 Pokmas.

BAB III
PROTES WARGA TERHADAP PJOK KOTA PADANG MENGENAI
PENYALURAN DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA
GEMPA 30 SEPTEMBER 2009 SUMATERA BARAT

3.1 Kebijakan Pemerintah

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Menurut Undang-Undang tersebut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yaitu meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Bencana Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD secara memadai. Dalam ayat (3) huruf c dinyatakan bahwa dalam penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD sebagaimana maksud pada Pasal 5 ayat (1) Pemerintah menyediakan dana bantuan sosial berpola hibah dan Pasal 6 ayat (5) menyatakan bahwa dana bantuan sosial berpola hibah disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

Dalam upaya untuk memperoleh hasil yang maksimal dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana Deputy Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mensyaratkan agar penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mengikuti ketentuan norma dan standar yang dikeluarkan oleh Kementrian/Lembaga terkait serta ketentuan pengaturan mekanisme pelaksanaan kegiatan, sehingga prinsip membangun kembali yang lebih baik dapat terpenuhi. Untuk itu perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai acuan kegiatan para pihak yang terkait dalam pengelolaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2010) .

Ada empat prinsip dasar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang diatur oleh Petunjuk Teknis. Pertama, untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara efektif dan efisien. Kedua, menjalankan fungsi koordinator pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ketiga, memberi petunjuk tata cara pencairan dana dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Keempat, menjadi petunjuk dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 Tahun 2008, untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dilakukan pengorganisasian pelaksana rehabilitasi

dan rekonstruksi secara berjenjang. Pada tingkat Pusat ada Koordinator pelaksana program ditingkat Pusat yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas nama Kepala BNPB. Ada tiga tugas utama Pemerintah Pusat. Pertama, memberikan arahan dalam kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, di Sumatera Barat. Kedua, menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, di Sumatera Barat. Ketiga, membentuk Tim Bantuan Teknis yang terdiri dari unsur pengarah, unsur Penyusun Program, unsur Tim Pendukung Teknis, dan Unsur Pelaksana, yang bertugas membantu BNPB dalam melaksanakan fungsi koordinasi di tingkat pusat di daerah.

Pada tingkat provinsi ada penanggung jawab tingkat provinsi. Penanggung jawab ini terdiri dari Gubernur Sumatera Barat, Bupati/Walikota, Kepala BPBD, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) tingkat provinsi. Penanggung jawab tingkat provinsi ini berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat serta mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh. Tugas penanggung jawab tingkat provinsi ini untuk menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup untuk pencegahan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Pada tingkat kabupaten ada tingkat penanggung jawab tingkat Kabupaten/Kota. Di tingkat Kabupaten/Kota ditunjuk pada Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (PPK Daerah) bagi Kabupaten/Kota yang telah membentuk BPBD oleh Sekretaris Utama BNPB selaku KPA atas nama Kepala BNPB yang diusulkan Bupati/Walikota. Tugas Bupati/Walikota adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi sektor perumahan.

Pada tingkat kecamatan ada penanggung jawab kecamatan yang ditunjuk oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sebagai penanggung jawab administrasi pelaksanaan program di wilayahnya. PJOK ini bertugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan di wilayah masing-masing. Di tingkat Kabupaten/Kota, PJOK juga merupakan representasi dari Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayahnya. Secara teknis, PJOK bertanggung jawab kepada PPK (Penjabat Pembuat Komitmen), sedangkan secara administratif PJOK bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Oleh karena itu PJOK diangkat oleh KPA/PPK BNPB, atas usul Bupati/Walikota. Mengingat kedudukan, tugas pokok, dan fungsi PJOK sangat strategis, maka pemilihan pejabat PJOK hendaklah memenuhi persyaratan kompetensi tertentu dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Tugas pokok PJOK adalah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana alam yang rumahnya rusak dan tidak bisa dihuni.

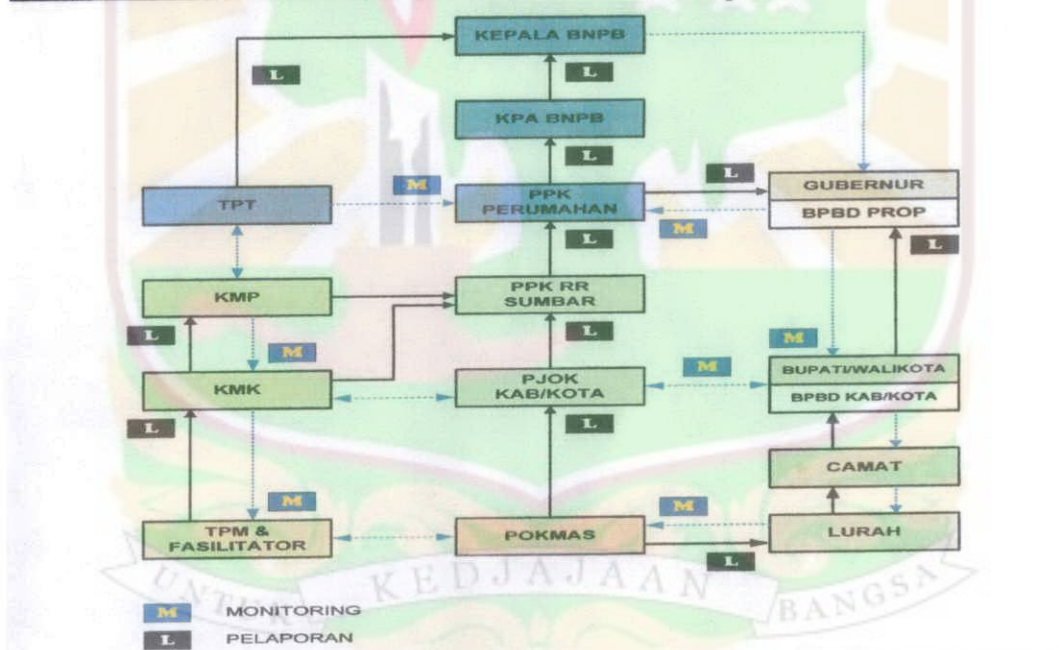
Dalam pengorganisasian masyarakat selain PJOK, camat dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga komunitas yang ada di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan. Ada tiga Tugas pokok ditingkat Kecamatan. Pertama, membentuk Tim Pendamping Masyarakat (TPM). Kedua, menetapkan dan melaporkan kepada Bupati/Walikota tentang jumlah penerima bantuan untuk mendapat pengesahan. Ketiga, memberikan pendampingan dalam memvalidasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan.

Pada tingkat nagari dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (Pokmas). Pokmas berfungsi membantu efektifitas dan efesinsi pelaksanaan perbaikan rumah yang rusak dan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi Perumahan. Keanggotaan Pokmas Perumahan terdiri dari Ketua (Sekaligus berperan sebagai Koordinator), Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Pokmas Perumahan ini terdiri dari 20 KK (Kepala Keluarga) korban gempa bumi dalam satu Nagari.

Dalam pelaksanaannya Pokmas didampingi oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Fasilitator. TPM dibentuk oleh Camat bersama-sama Walinagari/Lurah. TPM terdiri dari empat anggota. Pertama, satu orang unsur Kecamatan. Kedua, satu orang Tokoh Masyarakat/Walinagari.Lurah. ketiga, satu orang dari masyarakat yang memahami dan memiliki pengetahuan teknis pembangunan rumah. Keempat, satu orang unsur POLSEK/Koramil setempat, yang berfungsi untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor Perumahan. Selain dari TPM ada juga Tim

Fasilitator yang terdiri dari 2 orang (Fasilitator teknik dan Fasilitator non teknik) yang bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap minimal 80 rumah/KK (minimal 4 Pokmas Perumahan). Fasilitator dikelola, difasilitasi dan dikendalikan oleh PJOK Kabupaten/Kota. Tugas pokok Tim Fasilitator ini melakukan validasi kerusakan rumah dan mendata jumlah jiwa penghuni rumah untuk melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi Perumahan. Untuk lebih jelasnya terlihat pada Bagan Struktur Organisasi pada gambar 3.1 :

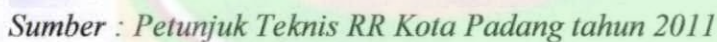
Gambar 3.1
Struktur Organisasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
Pasca Gempa Sumatera Barat Tahap III



Sumber : Petunjuk Teknis RR Kota Padang tahun 2011

Setelah kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi disepakati pihak-pihak yang berwenang, kegiatan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi mulai diterapkan. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pembendaharaan Nomor: PER-26/PB/2010, tanggal 30 Juli 2011, maka Bantuan Langsung Masyarakat

Gambar 3.2
Proses Pencairan Dana Bantuan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2011



47

Bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Sumatera Barat yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2009, yang bertujuan untuk memulihkan kerusakan perumahan warga akibat gempa dan sebagai pendukung strategis ekonomi daerah yang terkena bencana. Sehingga diperlukan pemulihan perumahan akibat gempa dengan cara penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang diatur oleh petunjuk teknis agar tata cara pencairan dan penyaluran dana berupa BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) perumahan agar pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Juknis RR Kota Padang Tahun 2011).

Untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan, Pemerintah mengalokasikan dana bantuan sosial berpola hibah melalui DIPA BNPB, dengan ketentuan bantuan (stimulus) perbaikan rumah diberikan dalam 3 kategori. Pertama, rumah kategori rusak berat, diberikan bantuan sebesar Rp.15.000.000 dengan dana APBN. Kedua, rumah kategori rusak sedang, diberikan bantuan sebesar Rp.10.000.000 dengan dana APBN. Ketiga, rumah kategori rusak ringan, diberikan bantuan sebesar Rp.1.000.000 yang penyediaan dananya oleh Pemerintah Daerah melalui dana APBD Kabupaten/Provinsi.

Begitu juga dengan Penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat yang terjadi di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah terjadi Tiga tahap. Tahap Pertama dimulai pada tahun 2009, tahap Kedua dimulai pada

tahun 2010, dan pada tahap Ketiga penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai pada tahun 2011.

Menurut data PJOK Kota Padang tahun 2011. Penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahap I dana disalurkan oleh pemerintah kepada penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kelurahan Surau Gadang sebanyak 1.288 unit rumah rusak berat, 129 unit rumah rusak sedang. Pada tahap II, dana disalurkan pemerintah kepada penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa sebanyak 1269 unit rusak berat, 4.06 unit rusak ringan, dan pada tahap III, dana disalurkan oleh pemerintah sebanyak 37 unit rumah rusak berat dan 260 unit rumah rusak sedang. Pada tahap I dan II tidak ada protes warga terhadap pemerintah (PJOK Kota Padang) karena penyaluran dana berjalan lancar sesuai dengan juknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009. Pada tahap III warga Kelurahan Surau Gadang protes ke PJOK Kota Padang terhadap penyaluran dana gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

3.2 Protes Warga

3.2.1 Aktor Protes

Warga kelurahan Surau Gadang kecamatan Kota Padang yang protes kepada PJOK kota Padang sebanyak 50 KK. Perihal mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III sebanyak. Warga tersebut protes kepada PJOK kota Padang karena tidak masuk pada daftar penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III.

Warga yang protes dikoordinatori oleh buk Efi Nurita (warga kelurahan Surau Gadang, 37 Tahun). Hal ini terjadi karena buk Efi Nurita memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap warga kelurahan surau gadang yang tidak masuk pada daftar penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III. Sehingga buk Efi Nurita bersedia mengkoordinir gerakan-gerakan protes warga tersebut, baik protes kepada PJOK kota Padang maupun kepada instansi terkait lainnya. Dalam hal ini buk Efi Nurita juga menstrukturkan warga kelurahan Surau Gadang sebanyak 50 KK yang memprotes kepada PJOK kota Padang mengenai tidak masuknya nama mereka pada daftar penerima dan gempa tahap III. Yang sebelumnya warga menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap pemerintah mengenai penyaluran dana gempa tahap III dengan cara mendatangi kantor PJOK secara sendiri-sendiri. Tetapi dengan adanya rasa kepedulian buk Efi Nurita kepada warga sebanyak 50 KK yang memprotes kepada PJOK kota Padang maka protes warga dapat terkoordinir dengan cara bersama sama menyampaikan kekecewaannya dengan cara mendatangi PJOK kota padang. Sehingga Efi Nurita (37 Tahun) dipercayai oleh warga 50 KK menjadi panutan mereka untuk memperjuangkan haknya sebagai penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III.

3.2.2 Penyebab Protes

3.2.2.1 Ketegangan Antar Warga Dengan PJOK

Pada Tahap III penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat, warga kelurahan Surau Gadang Kecamatan

Nanggalo memprotes PJOK Kota Padang. Menurut data PJOK Kota Padang tahun 2011 dalam pengaduan masyarakat penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat, Kecamatan Nanggalo merupakan Kecamatan yang banyak terjadi protes warga. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat *tabel 3.1* ;

Tabel 3.1 Data Pengaduan Masyarakat Penyaluran Dana Rehabilitasi DanRekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat

No	Kecamatan	Komplen Masyarakat	Total Rumah Rusak Sedang dan Berat	%
1.	Lubuk Kilangan	0	1.383	0
2.	Koto Tengah	130	3.773	3,4
3.	Kuranji	104	2.353	4.4
4.	Padang Barat	9	799	1.1
5.	Padang Utara	25	743	3.3
6.	Padang Selatan	53	708	7.4
7.	Padang Timur	0	1.460	0
8.	Nanggalo	88	994	8.8
9.	Lubuk Begalung	93	1.582	5,8
10.	Pauh	2	522	0.3
11.	Bungus Teluk Kabung	0	665	0

Sumber :Data PJOK kota Padang tahun 2011.

Di kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo, ada 600 KK yang tidak terdaftar sebagai penerima dana gempa. Sebanyak 50 KK dari 600 KK tersebut memprotes langsung kepada ketua PJOK Kota Padang. Mereka memprotes PJOK perihal nama mereka tidak masuk kedalam daftar sebagai calon penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III. Menurut mereka, mereka harus dimasukan pada daftar penerima dana gempa, karena rumah mereka 50 KK masuk pada kriteria kerusakan perumahan. Menurut tim Fasilitator rumah warga 50 KK tersebut tidak masuk kriteria

kerusakan. Warga Surau Gadang yang 50 KK tidak menerima hasil validasi tim fasilitator. Mereka kemudian mengadu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kom Nas HAM) Kota Padang. Mereka menuntut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kom Nas HAM) untuk membantu memecahkan masalah.

Pertemuan warga Surau Gadang sebanyak 50 KK yang diwakili dengan PJOK Kota Padang yang dilakukan oleh Kom Nas Ham berlangsung selama 8 jam pada tanggal 16 Desember 2011 di kantor Kom Nas Ham Kota Padang. Akan tetapi, rapat ini tidak mencapai kesepakatan. Hal ini dikarenakan warga Surau Gadang sebanyak 50 KK meminta PJOK Kota Padang untuk membandingkan data fasilitator di lapangan dengan data yang mereka buat. Tim Fasilitator dan ketua PJOK tidak bersedia membandingkan data yang dibuat oleh warga dengan data yang dibuat oleh fasilitator dengan alasan fasilitator sudah mendata dan memvalidasi rumah warga yang rusak akibat gempa berdasarkan petunjuk teknis yang ada. dengan kata lain, tim fasilitator dan ketua PJOK yakin data mereka valid dan menyalahkan warga yang memprotes.

Gambar 3.3
Mediasi antara warga Surau Gadang dengan PJOK kota Padang
di kantor Kom Nas Ham Padang



Sumber : Dokumentasi PJOK Kota Padang 16 Desember 2011

Warga kelurahan Surau Gadang sebanyak 50 KK tidak puas dengan hasil pertemuan di kantor Kom Nas Ham tersebut. Mereka menulis surat kepada Wali Kota Padang dan diadakan pertemuan pada tanggal 9 Desember 2011 di rumah Wali Kota Padang. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan warga Surau Gadang 50 KK sebanyak 20 KK yang diketuai oleh Efi Nurita (37 tahun, warga Surau Gadang), kepala Lurah Surau Gadang, serta fasilitator dan tim PJOK lainnya. Sehingga hasil keputusan dari pertemuan rapat tersebut diterima oleh warga kelurahan Surau Gadang.

Menurut kepala PJOK Kota Padang (Bapak Asnul ZA, 54 tahun) yang diwawancarai pada tanggal 29 Desember 2011, PJOK Kota Padang dan Tim Fasilitator akan turun langsung kelapangan untuk mendata dan memvalidasi ulang rumah warga Surau Gadang sebanyak 50 KK. Apabila rumah mereka masuk pada kriteria kerusakan maka warga yang 50 KK itu akan dimasukkan nama mereka pada daftar penerima dana gempa tahap IV.

Adapun kriteria rumah yang layak mendapat bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dalam juknis rehabilitasi dan rekonstruksi Tahun 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penetapan Kriteria Kerusakan Perumahan

No	Kategori kerusakan	Kriteria kerusakan	Uraian
1.	Barat	Bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak	• Bangunan roboh total • Sebagian besar struktur utama bangunan rusak • Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak • Secara fisik kondisi kerusakan >50% • Komponen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan/beresiko difungsikan • Perbaikan dengan rekonstruksi
2.	Sedang	Bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen penunjangnya rusak	• Bangunan masih berdiri • Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak • Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak • Relative masih berfungsi • Secara fisik kerusakan 30%-50% • Perbaikan dengan rehabilitasi
3.	Ringan	Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa difungsikan)	• Bangunan masih berdiri • Sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan • Retak-retak pada dinding plesteran • Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak • Masih bisa difungsikan • Secara fisik kerusakan >30%

Sumber : Petunjuk Teknis RR Kota Padang tahun 2011.

Menurut warga kelurahan Surau Gadang Efi Nurita (37 tahun) yang diwawancarai pada tanggal 03 Februari 2012, tim fasilitator tidak secara langsung mendata rumah warga, seperti kutipan wawancara berikut :

"...fasilitator meminta data rumah rusak akibat gempa langsung dari pihak kelurahan, tanpa mendatangi masing-masing rumah warga..."(Efi Nurita, 37 tahun).

Tim fasilitator mendapatkan data langsung dari pihak kelurahan tanpa mendata masing-masing rumah warga yang ada dikerulahan Surau Gadang. Inilah yang menyebabkan adanya warga Surau Gadang yang tidak terdata secara keseluruhan.

Dipihak lain, menurut Fasilitator Teknik kelurahan Surau Gadang (Nina Gustina, 27 tahun) yang diwawancarai pada tanggal 2 Februari 2012, warga ke lurahan Surau Gadang sebanyak 50 KK yang memprotes kepada PJOK Kota Padang tidak masuk kedalam daftar penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahap III, karena rumah mereka tidak masuk dalam kriteria penetapan kerusakan pada rumahnya.

Akan tetapi, Setelah Konsultan turun ke lapangan, ternyata rumah warga 50 KK yang protes tersebut masuk kedalam penetapan kriteria kerusakan perumahan. Oleh sebab itu, mereka pantas menerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 2009 Sumatera Barat pada tahap III. Artinya, memang ada kelemahan pemerintah dalam mendata dan memvalidasi rumah, sehingga protes warga sebanyak 50 KK kepada PJOK cukup beralasan.

3.2.2.2 Warga Tidak Tau Juknis

Pada penerima dana gempa tahap III, warga kelurahan Surau Gadang juga memprotes PJOK Kota Padang mengenai lambatnya penyaluran dana gempa. Warga kelurahan Surau Gadang sebanyak 50 KK protes kepada Ketua PJOK Kota Padang karena keterlambatan penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III. Warga kelurahan

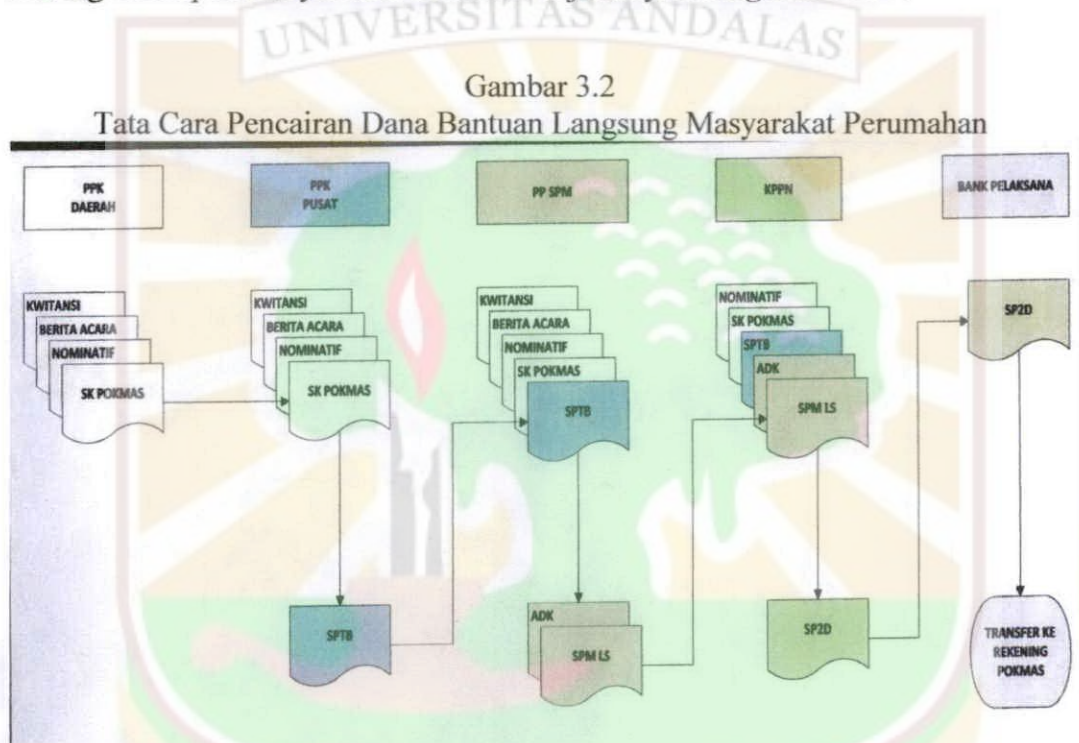
Surau Gadang meminta kepada PJOK Kota Padang untuk menyalurkan dana gempa lebih cepat. Mereka memprotes karena warga Surau Gadang menduga pemerintah mempergunakan dana gempa untuk keperluan lain. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga kelurahan Surau Gadang, seperti berikut :

"...lah sejak tahun 2009 rumah rusak dek gempa. Baru tahun 2012 ko dana nyo ka disalurkan..." (Efi Nurita, 37 tahun, 05/02/2012).

Menurut Kepala PJOK Kota Padang (Asnul, 54 tahun) yang diwawancara pada tanggal 29 Desember 2011, penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tidak terlambat, melainkan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Sumatera Barat Tahun 2011. Katanya, dana yang akan disalurkan ke masing-masing kelompok masyarakat atau masing-masing warga harus sesuai dengan prosedur yang ada dalam juknis (petunjuk teknis). Tata cara penyaluran dana rehabilitasi harus adanya Surat Keputusan dari berbagai pihak untuk disahkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini memerlukan waktu agar penyaluran dana berjalan berjalan lancar sebagai mana mestinya. Inilah yang membuat pencairan dana tidak dapat dilakukan seperti yang diinginkan oleh warga.

Adapun tata cara pencairan dana bantuan langsung masyarakat perumahan yaitu: a) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Daerah mengajukan permintaan pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Pusat; b) Berdasarkan permintaan pembayaran (SPP), PPK Pusat mengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM; c) Pejabat Penandatanganan SPM (PP SPM) akan melakukan pengecekan dan pemeriksaan

administratif atas kelengkapan SPP yang diajukan oleh PPK Pusat. Untuk selanjutnya PP SPM akan menerbitkan dan menandatangani SPM untuk disampaikan kepada KPPN; d) berdasarkan SPM-LS, KPPN menerbitkan SP2D kepada Bank Pelaksana untuk pembayaran langsung kepada rekening masing-masing kelompok masyarakat. Untuk lebih jelasnya lihat *gambar 3.2* ;



Sumber : Petunjuk Teknis RR Kota Padang Tahun 2011.

Hal diatas juga diungkapkan oleh sekretaris PJOK Kota Padang. Menurut dia yang diwawancarai pada tanggal 31 Desember 2011, warga Surau Gadang sebanyak 50 KK yang memprotes PJOK Kota Padang untuk menuntut percepatan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahap III dikarenakan warga Surau Gadang tidak mengetahui tentang petunjuk teknis tata cara pembayaran dana rehabilitasi dan rekontruksi. PJOK dan tim fasilitator memang tidak memberi tahu warga tentang petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dana rehabilitasi dan

rekonstruksi. akibatnya warga Surau Gadang tidak mengetahui proses penyaluran dana tersebut. Artinya, memang ada kelemahan pemerintah dalam memberikan pemahaman tentang proses penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

Menurut teori ketegangan struktural Smelser, ketegangan sosial merupakan kendaraan kolektif baik formal maupun informal. Dengan ketegangan ini mobilisasi dapat dilakukan secara bersama karena adanya pendukung yang dapat dikerahkan. Hal inilah penyebab terjadinya perlawanan. Dalam penerimaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat terjadi ketidakmerataan bantuan terhadap warga kelurahan Surau Gadang. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketegangan antara warga yang tidak mendapat bantuan dengan pihak yang bertanggung jawab sebagai penyaluran dana yaitu PJOK dan fasilitator. Ketegangan inilah yang menyebabkan warga Surau Gadang sebanyak 50 KK melakukan protes kepada PJOK Kota Padang.

Smelser juga menyatakan ketegangan struktural adalah tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kelompok sosial dalam aksi kolektifnya. Aksi kolektif muncul karena ada sesuatu yang salah dalam lingkungan sosialnya sehingga ketegangan struktural itu tidak sistematis. Warga Surau Gadang melakukan protes ke PJOK Kota Padang agar warga kelurahan Surau Gadang sebanyak 50 KK mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat pada Tahap III. Aksi kolektif ini dilakukan

warga karena ada sesuatu yang salah dalam lingkungan sosialnya. Hal itu berupa, adanya warga Surau Gadang yang tidak masuk data dalam penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap III. Hal ini disebabkan oleh fasilitator bekerja tidak sesuai petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.

3.3 Cara Penyampaian Aspirasi

3.3.1 Mendatangi Instansi Terkait

Warga kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang menyampaikan aspirasinya untuk memperjuangkan haknya sebagai penerima dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa. Cara penyampaian aspirasinya adalah dengan mendatangi instansi terkait, dari tingkat kelurahan sampai ke tingkat Provinsi. Dari sekian kali pertemuan, warga kelurahan Surau Gadang sebanyak 50 KK tidak semua yang ikut komplek. Mereka diwakili oleh 1 koordinator yaitu ibu Efi Nurita (37 tahun, warga kelurahan Surau Gadang).

Pada tingkat Kelurahan warga Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang menyampaikan aspirasinya ke Kantor Lurah. Warga kelurahan Surau Gadang yang diwakili oleh 18 KK dari 50 KK yang komplek ke kantor Lurah. Ketika itu mereka sebanyak 18 KK juga dikoordinasi oleh ibu Efi Nurita (37 Tahun, warga Surau Gadang). Mereka mendatangi kantor lurah mempersoalkan nama mereka tidak masuk daftar sebagai penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III. Warga kelurahan Surau Gadang sebanyak 50 KK ditawarkan untuk masuk daftar pada penerima dana gempa tahap IV. Tetapi mereka menolak bantuan dana

rehabilitasi dan rekonstruksi tahap IV tersebut, karena menurut mereka rumah mereka sudah didata oleh tim Fasilitator dan TPM untuk masuk tahap III.

Pengaduan warga Surau Gadang tersebut tidak ditanggapi oleh Kelurahan. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Surau Gadang (Elfian, 45 tahun) yang diwawancarai pada tanggal 13 Januari 2012, sebagai berikut :

"...masalah dana rehabilitasi dan rekonstruksi sudah selesai pada bulan September 2011. Pihak kelurahan sudah menyerahkan semua daftar nama-nama penerima dana gempa di kelurahan Surau Gadang kepada PJOK Kota Padang. Untuk penyaluran dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahap IV belum ada kejelasannya karena dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahap III masih dalam proses PJOK Kota Padang..." (Elfian, 45 tahun, 13/01/2012).

Metro Padang (Rabu, 16 November 2011) memberitakan adanya warga Surau Gadang yang menolak bantuan gempa tahap IV. Mereka mendatangi kantor lurah Surau Gadang untuk mempertanyakan transparansi pencairan bantuan gempa. Ketika itu, warga Surau Gadang sebanyak 50 KK ditawarkan dana bantuan gempa untuk tahap IV. Padahal untuk tahap III sendiri masih belum dicairkan. Sehingga, warga kelurahan Surau gadang sebanyak 50 KK menolak bantuan tahap IV karena tidak sesuai dengan pendataan yang sudah dilakukan.

Penyampaian aspirasi warga Surau Gadang juga dilakukan kepada tingkat Kecamatan/Kota. Warga kelurahan Surau Gadang sebanyak 20 KK dari 50 KK yang memprotes mendatangi Kantor PJOK Kota Padang untuk meminta nama mereka dimasukkan pada daftar penerima dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III. Mereka juga diwakili 1 koordinator yaitu buk Efi Nurita (37 tahun, warga Surau Gadang). Mereka pergi

dengan kendaraan pribadi roda dua, ada juga sebagian mereka dengan menggunakan angkutan kota. Protes mereka ditanggapi baik oleh tim PJOK Kota Padang. Akan tetapi, buk Efi Nurita (37 tahun) sebagai koordinator dan perwakilan warga dari 50 KK tidak puas dengan penjelasan ketua PJOK, sehingga protes mereka terus berlanjut. Kemudian mereka melanjutkan aspirasinya berupa tulisan/surat kepada Walikota dan Gubernur.

Aspirasi berupa surat ditulis oleh Buk Efi Nurita (37 tahun, koordinator dari warga kelurahan Surau Gadang sebanyak 50 KK) pada tanggal 9 Desember 2011. Surat tersebut berisikan masalah penyaluran dana gempa yang ada dikelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo. Surat yang dibuat Buk Efi Nurita (koordinator warga Surau Gadang sebanyak 50 KK) ditujukan kepada Bapak Walikota Padang. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa, pada tanggal 15 November 2011 warga kelurahan Surau Gadang demo ke kantor Lurah Surau Gadang untuk menolak bantuan dana gempa tahap IV dan Pada tanggal 16 November 2011, data korban gempa masih bermasalah.

Pengaduan buk Efi Nurita (koordinator dari warga Surau Gadang sebanyak 50 KK) berupa surat masalah penyaluran dana gempa tahap III juga sampai ke tingkat Provinsi. Surat tersebut ditujukan kepada bapak Gubernur Sumatera Barat. Isi surat juga sama dengan masalah yang disampaikan warga Surau Gadang Kepada Bapak Walikota. Menurut Efi Nurita (37 tahun, koordinator warga Surau Gadang sebanyak 50 KK) yang diwawancarai pada tanggal 3 Februari 2012, pengaduannya diterima dengan baik oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan Buk Efi Nurita dan kawan-kawan sebanyak 50 KK mempunyai bukti

dan data yang kuat tentang rumah mereka yang rusak akibat gempa bumi pasca gempa 30 September 2009. Laporan dan lampiran mereka diterima oleh bapak Gubernur dan disuruh untuk menyelesaikan masalah penyaluran dana gempa ini dengan tuntas. Dan akan dimasukkan pada daftar penerima dan gempa tahap III. Tetapi kenyataannya, warga Surau Gadang sebanyak 50 KK tidak terdaftar pada penerima dan gempa tahap III.

3.4 Hasil Protes

Protes warga terhadap penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat kepada PJOK Kota Padang membuat PJOK Kota Padang dan tim lainnya mendata ulang kondisi rumah warga Surau Gadang sebanyak 50 KK. Setelah didata ulang, ternyata benar adanya kesalahan dalam pendataan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 2009 Sumatra Barat. Sebanyak 8 KK dari 50 KK warga Surau Gadang dinyatakan masuk kriteria dalam penetapan kerusakan perumahan yaitu masuk penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kriteria kerusakan perumahan kategori rusak sedang. Nama mereka dimasukkan sebagai penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III. Sedangkan warga kelurahan Surau Gadang yang memprotes PJOK sebanyak 42 KK tersebut masuk pada kriteria rumah rusak ringan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka rumah rusak ringan tidak diberikan dana gempa tahap III.

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III sudah disalurkan pemerintah pada bulan Januari 2012.

Dana tersebut juga disalurkan oleh pemerintah kepada 8 KK dalam bentuk tunai sebanyak Rp.10.000.000,00. Dana disalurkan melalui kelompok masyarakat (pokmas) sebanyak satu kali tahapan. Warga kelurahan Surau Gadang yang protes kepada PJOK sebanyak 42 KK tidak masuk pada penetapan kriteria kerusakan perumahan. Mereka yang 42 KK menerima hasil keputusan dari falidasi ulang yang sudah dilakukan oleh tim PJOK Kota Padang.

Berikut gambar rumah seorang warga kelurahan Surau Gadang (Nurima, 60 tahun) yang rusak akibat pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat, dan masuk pada daftar penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahap III.

Gambar 3.5
Rumah Penerima Dana RR Pasca Gempa 30 September 2009
Sumatera Barat Tahap III



Rumah nenek Nurima yang belum direnovasi
Sumber : Dokumentasi PJOK Kota Padang tahun 2011



Bagian dalam rumah nenek Nurima yang belum direnovasi.
Sumber : Dokumentasi PJOK Kota Padang tahun 2011

4. Situasi Terkini

Menurut ketua PJOK Kota Padang yang diwawancarai pada tanggal 9 Januari 2012, bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahap III di kota Padang sudah dilakukan dalam dua termin yakni termin I sebanyak 712 pokmas jumlah dana sebanyak Rp102,9 milyar dengan persentase mencapai 96% dan termin II sebanyak 668 pokmas telah dicairkan dengan jumlah dana sebanyak Rp45,64 milyar dengan persentase mencapai 91%. Diantaranya 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Nanggalo, dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September tahap III sudah disalurkan dengan total bantuan sebanyak Rp4,36 milyar, yakni di kelurahan Tabiang Banda Gadang, Gurun Laweh, Kurao Pagang, Kampung Olo, Kampung Lapai dan kelurahan Surau Gadang. Setelah pembagian dana tahap III selesai, warga yang belum menerima dana gempa masih berharap untuk masuk pada taftar penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Sumatera Barat tahap IV.

Sesuai yang diberitakan pada *PJOK Padang.com* (Senin, 12 Maret 2012) memberitakan Proses validasi pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahap IV akan diselenggarakan bulan Mai 2012. Untuk kota Padang disediakan sebanyak 7225 unit kuota dengan alokasi anggaran dana mencapai 84,48 milyar. Sehingga PJOK Kota Padang akan mengumpulkan seluruh lurah yang ada di Kota Padang untuk bisa menseleksi rumah-rumah yang layak menerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahap IV di Kota Padang.

Sebanyak 180 fasilitator kelurahan Kota Padang sudah dibekali Juknis (petunjuk teknis) rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap IV. Pembekalan tersebut dilaksanakan difakultas teknik Universitas Bung Hatta pada tanggal 12 Maret 2012. Perekrutmen fasilitator ini sesuai dengan kriteria Juknis rehabilitasi dan rekonstruksi tahap IV yang mempunyai pengalaman dan mampu melaksanakan tugas dengan profesional. Agar tidak ada lagi terjadi kekeliruan dan aksi kolektif warga terhadap PJOK kota Padang mengenai penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap IV.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian terdahulu, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Warga memprotes PJOK Kota Padang adalah adanya ketidakpuasan warga terhadap penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III. Warga yang memprotes merasa PJOK kota Padang keliru dalam pendataan rumah warga yang rusak akibat gempa, dan tidak memasukkan nama mereka pada daftar penerima bantuan dana gempa. Menurut mereka, rumah mereka mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat.
2. Protes warga terhadap PJOK Kota Padang tidak semuanya membuahkan hasil. Ada warga yang pantas sebagai penerima dana dan ada juga warga yang tidak pantas sebagai penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat pada tahap III. Warga yang pantas sebagai penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap III setelah memprotes kepada PJOK Kota Padang ada sebanyak 8 KK, sedangkan warga yang tidak pantas sebagai penerima dana gempa tahap III setelah memprotes PJOK Kota Padang ada sebanyak 42 KK. Hal ini disebabkan warga yang 8 KK masuk pada penetapan kriteria kerusakan

pada perumahan dan masuk pada kriteria rusak sedang, sedangkan warga sebanyak 42 KK tidak masuk pada penetapan kriteria kerusakan pada perumahannya. Warga yang sebanyak 42 KK melakukan protes kepada PJOK kota Padang karena rumah mereka rusak akibat gempa dan mereka merasa pantas sebagai penerima dana gempa tahap III. Setelah di data ulang oleh PJOK ternyata rumah mereka sebanyak 42 KK termasuk kedalam rusak ringan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, rumah warga yang masuk kriteria rusak ringan tidak mendapatkan dana gempa. Warga sebanyak 42 KK menerima keputusan dari pemerintah, dan warga sebanyak 8 KK telah mendapatkan dana gempa dan dananya telah digunakan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat gempa.

3. Bentuk protes yang dilakukan warga kepada PJOK Kota Padang adalah warga mendatangi kantor Lurah Surau Gadang Kecamatan Nanggalo dan mendatangi kantor PJOK Kota Padang. Protes warga juga berupa surat yang ditulis kepada Walikota, DPRD kota Padang dan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk memperjuangkan haknya sebagai penerima dana dan masuk daftar pada nama penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Sumatera Barat pada tahap III.

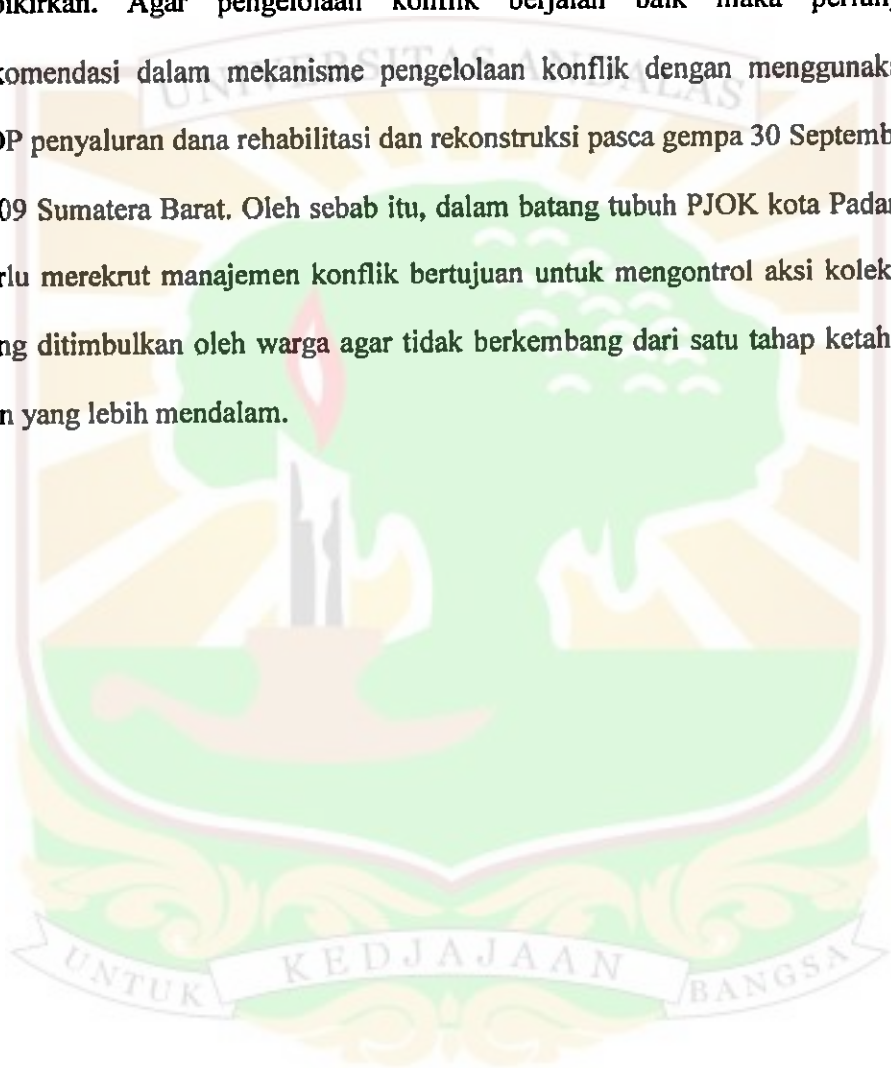
4.2 Saran

1. Penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat yang disalurkan oleh pemerintah terhadap warga yang terkena dampak gempa ternyata belum mencapai hasil yang baik karena pada dasarnya

banyak warga yang belum terdata dan tidak masuk pada penerima dana gempa tahap III. Oleh sebab itu, dalam upaya penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi kepada warga, maka pemerintah Kota harus lebih paham petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan meningkatkan kualitas dalam pendataan rumah warga yang rusak.

2. Perlunya komunikasi dua arah untuk memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan komunikasi yang baik, maka akan tercipta kesamaan pemahaman baik dalam peraturan maupun dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan. Sehingga, jika kesepahaman telah tercipta maka tidak ada alasan bagi warga untuk memprotes PJOK Kota Padang sebagai penanggung jawab kegiatan penyaluran dana gempa.
3. PJOK adalah Institusi kegiatan dalam penyaluran dana gempa bagi warga yang terkena dampak gempa yang dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta sesuai dengan norma dan petunjuk teknis yang ada. Jangan sampai PJOK melaksanakan penyaluran dana gempa secara tidak adil dan tidak transparan terhadap warga. Pandangan saya sesuai dengan yang diberitakan pada *Padang Ekspres*, 21 September 2011 menyatakan bahwa PJOK tidak transparan dalam menyajikan data penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III. Sehingga, warga banyak yang kecewa melihat hasil yang dikeluarkan oleh tim fasilitator dan tim PJOK lainnya.

4. Dari hasil penelitian saya ini, saya tidak menemukan mekanisme dalam pengelolaan konflik. Artinya, mekanisme dalam penanganan konflik yang berupa aksi kolektif yang dilakukan oleh warga kepada pemerintah belum dipikirkan. Agar pengelolaan konflik berjalan baik maka perlunya rekomendasi dalam mekanisme pengelolaan konflik dengan menggunakan SOP penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat. Oleh sebab itu, dalam batang tubuh PJOK kota Padang perlu merekrut manajemen konflik bertujuan untuk mengontrol aksi kolektif yang ditimbulkan oleh warga agar tidak berkembang dari satu tahap ketahap lain yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Dari Pengertian sampai Penulisan Laporan*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- , 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang: Andalas University Press.
- Coser, Lewis. 1967. *Continuities in the Study of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Echols, John. M dan Shadily, Hassan. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- INPB, 2010. *Bukan Gempannya Tapi Bangunannya*. Kegiatan Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
- Klandersman, Bert. 2005. *Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lofland, John. 2003. *Protes: Studi Tentang Prilaku Kelompok Dan Gerakan Sosial* (diterjemahkan oleh Luthfi Ashari). Yogyakarta: INSIST Press.
- Maarif, Syamsul. 2010. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana*. Jakarta : BNPB.
- , 2011. *Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Bidang Perumahan*. Jakarta : BNPB.
- Miall, H. Ramsbotham, O. Woodhouse, T. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rusdakarya.
- Poloma, M. Margaret. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pramono, Wahyu. 2002. *Diktat Metode Penelitian Sosiologi II*. Padang: FISIP Universitas Andalas.

- Pruitt, D. G. dan J. Z. Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ritzer, G. dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Situmorang, A Wahid. 2007. *Gerakan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soejono. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Smelser, Neil J. 1962. *Theory of Collective Behavior*. New York : The Free Press.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*. Amerika Serikat : Addison-Wesley Publishing Company.
- UNAND, BEM. 2011. *International Symposium on Disaster Mitigation*. Basko Grand Hotel.
- Wahyudi. 2009. *Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani*. Kalibakar Malang Selatan. *Studi Kasus : Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Skripsi :

- Refianda Edwin. 2010. "Dampak Gempa Terhadap Usaha Kerajinan Sulaman (Kasus Usaha Kerajinan Sulaman Yang Dikelola Oleh Perempuan Desa Naras 1 Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman). *Skripsi* Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- Nurheni. 2007. "Pandangan Komunitas Lokal Tentang Fenomena Bencana Alam (Studi Kasus : Kejadian Banjir Bandang Dalam Analisis Sosiologis Di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan). *Skripsi* Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas.

Situs :

<http://Ashoka.or.id/download/manajemen/bencana/berbasis/apa>.
Diakses tanggal 18 Mai 2011.

[http://depsos.go.id/unduh/ perempuan dan Bencana.pdf](http://depsos.go.id/unduh/perempuan%20dan%20Bencana.pdf).
Diakses tanggal 5 Maret 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_gempa_bumi_di_indonesia.
Diakses tanggal 2 Mai 2011.

<http://geografi.web.id/2009/08/geormorfoligi-sumatera.html>.
Diakses tanggal 5 Mai 2011.

<http://Portal.vsi.esdm.go.id/gempabumi.htm>. *Diakses tanggal 03 Mai 2011.*

<http://PJOKPadang.com/180-faskel-tahap-iv-diberi-pembekalan.html>.
Diakses tanggal 31 Maret 2012.

<http://repository.usu.ac.id>. *Diakses tanggal 8 Maret 2011.*

<http://rumahamangempa.net/>. *Diakses tanggal 4 April 2011.*

Artikel pada Surat Kabar:

Padang Ekspres, “ Pemerintah Mulai Pajang Penerima Dana Gempa 30 September 2009”. Rabu, 21 Septemeber 2011.

Padek, “Penyaluran Lamban, Butuh Empati Birokrasi” ,
Jum’at, 23 September 2011.

Singgalang, “ Warga Kecewa, Datangi Kantor PU”. Kamis, 30 Juni 2011.

Posmetro Padang, “warga surau gadang tolak bantuan gempa tahap IV”
Rabu, 16 November 2011.

Sumber Lain:

Afrizal. 2011. *Hand-Out Mata Kuliah Gerakan Sosial*. Padang: FISIP Universitas Andalas.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16. 2010. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana*. Jakarta : BNPB.

PJOK. 2011. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bidang Perumahan Tahap III*. Padang : BNPB.

Undang-Undang RI Nomor 24. 2007. *Tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta : Presiden RI.



Lampiran 1

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sovia Jasman
2. Tempat/Tgl lahir : Limau Gadang, 05 Oktober 1990
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jln. Rimbo Panjang Laban. Kelurahan Salido,
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesissir Selatan.

B. Riwayat Pendidikan

1. Tamat Sekolah Dasar tahun 2002 di SD N 22 Impres Salido.
2. Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tahun 2005 di SLTP N 2 Painan.
3. Tamat Sekolah Menengah Atas tahun 2008 di SMA N 1 Painan.
4. Lulus Sarjana S1 Jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tahun 2012

C. Riwayat Organisasi :

1. Pengurus OSIS SLTP N 2 Painan periode 2004-2005.
2. Pengurus OSIS SMA 1 Painan priode 2007-2008.
3. Anggota mahasiswa Asrama Unand 2008-2009.
4. Anggota Hima Sosiologi periode 2008/2012.
5. Anggota BBMK MAPALA UNAND 2008
6. Anggota MAPALA FISIP UNAND 2008 Sampai sekarang.

7. Anggota Himpunan Mahasiswa Pesisir Selatan 2008.

D. Pelatihan Yang Pernah diikuti

1. ESQ tahun 2008.
2. Pelatihan Soft Skill Asrama UNAND tahun 2008.
3. Training of Fasilitator Participatory Rural Appraisal tahun 2011.
4. Pelatihan Bina Bakat Minat dan Kepemimpinan (BBMK) MAPALA UNAND 2008.



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

PROTES WARGA TERHADAP PJOK KOTA PADANG MENGENAI DANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA GEMPA 30 SEPTEMBER 2009 SUMATERA BARAT

Tanggal :
Lokasi :

Identitas Informan	
1. Nama	:
2. Umur	:
3. Jenis Kelamin	:
4. Jabatan/Institusi	:
5. Alamat	:
6. Penghasilan	:

1. Latar belakang informan

- Apakah terdaftar sebagai penerima bantuan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa 2009 Sumatera Barat?
- Termasuk kedalam kategori rusak apakah penerima dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi?
- Berapa banyak dana yang diperoleh?
- Berapa kali tahapan perolehannya?
- Berupa apakah dana yang disalurkan?
- Dipergunakan untuk apa dana rehabilitasi tersebut?
- Apakah bantuan dana yang disalurkan mencukupi untuk perbaikan rumah yang rusak?
- Apakah dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi membantu pemulihan kerusakan bangunan?

- i. Melalui siapa dana tersebut dialokasikan?
 - j. Apakah bantuan dana rehabilitasi tersebut utuh dibagikannya?
2. Bentuk kerusakan informan
- a. Bangunan bagian mana yang mengalami kerusakan?
 - b. Termasuk kedalam kategori rusak apakah rumah yang ditempati?
 - c. Bagaimana proses penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut?
 - d. Siapa yang mendampingi?
 - e. Apakah sesuai petunjuk teknis (Juknis)?

Penyebab munculnya protes penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi

1. Bagaimana menurut penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap proses pelaksanaan penyaluran dana rehab rekon tersebut?
2. Apakah proses penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai petunjuk teknis (Juknis)?
2. Apakah ada pemotongan dana?
3. Berapa % pemotongan dari dana yang diterima?
4. Untuk apa dana potongan tersebut?
5. Apakah ada keluhan terhadap pemotongan dana ?
6. Kesiapa saja penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi melakukan protes?

Bentuk protes penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat

1. Apa yang diproteskan penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi?
2. Apa bentuk protes penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi?
3. Kenapa penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi protes?
4. Kemana penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi melakukan protes?
5. Mengapa cara itu yang dipakai untuk protes?
6. Apa yang diharapkan setelah protes?

Lampiran 3

Data-Data Informan

1. Nama : Asnul,ZA
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : PJOK KOTA PADANG
Jenis Informan: kepala PJOK Kota Padang
2. Nama : Rani Ahmad Yani
Umur : 52 tahun
Pekerjaan : PJOK Kota padang
Jenis Informan: Sekretaris kepala PJOK Kota Padang
3. Nama : Firdaus
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia SUMBAR
Jenis Informan: Kasubag Pengaduan Masyarakat
4. Nama : Elfian, SH
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Tokoh Masyarakat
Jenis Informan: kepala Lurah
5. Nama : Nina Gustina
Umur : 27 tahun
Pekerjaan : PJOK Kota padang
Jenis Informan: Fasilitator Kelurahan Surau Gadang
6. Nama : Ahwarni
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : PJOK Kota padang
Jenis Informan: Fasilitator Kelurahan Surau Gadang
7. Nama : Efinurita
Umur : 37 tahun
Pekerjaan : Swasta
Jenis Informan: Koordinator warga 50 KK
8. Nama : Nurima
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Rumah Tangga
Jenis Informan: warga penerima dana RR tahap III

CATATAN LAPANGAN

1. Hasil Wawancara Dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kota Padang

Informan 1

Tanggal : 29 Desember 2011 – 15 Januari 2012
Lokasi : di kantor PU dan Kantor PJOK Kota Padang.

a. Identitas Informan

Nama : Asnul, ZA.
Umur : 54 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan Terakhir : Sarjana Teknik
Jabatan : Kepala PJOK Kota Padang
Status : Menikah
Agama : Islam

Apakah ada masyarakat yang komplek terhadap penyaluran dana rehabilitasi pasca gempa 30 september 2009?

Ada, dari sekian banyak kecamatan di kota padang, saya melihat bahwa di Kecamatan Nanggalo kelurahan Surau Gadang yang paling banyak terjadi protes. Warga itu langsung protes kepada saya selaku PJOK. Protes dan kelurahan mereka saya terima dengan baik. Dari banyak warga yang protes, Ada beberapa kelompok masyarakat sekitar 50 KK yang mendatangi kantor ini untuk dimasukan nama-nama mereka pada daftar nama penerima dana gempa. Mereka yang 50 KK juga melapor dan mendatangi kantor Kom Nas Ham Kota Padang untuk dimediasi.

Waktu itu, warga yang 50 KK bersikeras untuk dimasukan nama mereka pada tahap III, mereka yang 50 KK minta dibandingkan data fasilitator yang dilapangan dengan data yang mereka buat. Tetapi kami belum mau membandingkan data mereka karena fasilitator sudah menfalidasi ulang data mereka, sudah lebih dari 8 jam dimediasi ternyata belum juga mencapai kesepakatan.

Dan juga ada kasus perdebatan warga surau gadang melalui surat mereka menduga dengan adanya keterlambatan penyaluran dana rehab rekon ini PJOK dan tim lainnya menggunakan dana untuk keperluan lain, mereka juga menduga kalau kami disini bekerja tidak bener dan mereka mengira kami korupsi dana gempa.

Apak sebagai PJOK dan hanya sebagai penanggung jawab ini tidak bisa membantu mereka apa bila rumah mereka bener-bener tidak rusak, karena apak bekerja sesuai juknis dan pedoman yang sudah ada. Jadi ketika mereka tetap ngotot, kami tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Bagaimana menurut bapak tentang warga yang 42 KK setelah tau kalau rumah mereka termasuk kedalam criteria kerusakan?

Iya itu kesalahan dari fasilitator dalam melakukan pendataan, tapi saya sebagai PJOK akan secara langsung untuk mendata dan memvalidasi ulang rumah mereka yang 42 KK. Dan ketika data mereka valid maka kami akan dimasukan pada daftar nama penerima dana gempa tahap IV.

Informan II

Tanggal : 31 Desember 2011 - 10 Januari 2012

Lokasi : di Kantor PJOK Kota Padang.

a. Identitas Informan

Nama : Rani Ahmad Yani

Umur : 25 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan Terakhir : Diploma Akuntansi

Jabatan : Sekretaris PJOK Kota Padang

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Kakak disini sebagai sekretaris PJOK. Di kota Padang banyak yang komplek, rata-rata di masing-masing kecamatan di kota Padang mengalami komplek. Masalah kompleknya banyak mengenai tidak terdaftarnya pada pembagian dana gempa, dan tidak masuk data pada tahap III. Ada salah satu kasus yang terjadi di Surau gadang,

masyarakatnya protes langsung ke PJOK mengenai tidak terdaftarnya mereka pada tahap III ini, sehingga kasus mereka sampai dimediasi oleh Kom Nas Ham Kota Padang antara PJOK dengan warga surau gadang sebanyak 50 KK, mereka meminta perlindungan kepada Kom Nas Ham. Kakak menilai masyarakat itu protes karena mereka tidak paham juknis penyaluran dana gempa. Untuk lebih jelasnya tanyakan saja langsung sama pak PJOK dan langsung k Kantor Kom Nas Ham.

Informan III

Tanggal : 13 Januari 2012
Lokasi : di kantor KOM NAS HAM Kota Padang.

- a. Identitas Informan :
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| Nama | : Firadau |
| Umur | : 48 Tahun |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Pendidikan Terakhir | : Sarjana |
| Jabatan | : Kasubag Pengaduan Masyarakat |
| Status | : Menikah |
| Agama | : Islam |

Kasus mediasi antara warga Surau Gadang dengan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kota Padang (rehabilitasi dan rekonstruksi kantor perumahan pasca gempa bumi 9 september 2009 di kantor KOMNAS HAM kota padang.

Waktu : 09.00-16.00
Hari : Jum'at
Tanggal : 16 desember 2011

Bapak firdaus bercerita tentang mediasi antara warga Surau Gadang dengan PJOK kota padang.

Adanya Komplen antara warga Surau Gadang Kecamatan Nanggalo yang terdiri dari 50 orang dengan PJOK kota padang. Mereka mengira tidak dapat bantuan bahkan tidak dimasukan data karena itu mereka mengira adanya penyimpangan dana dan setelah diurus kemana-

kerusakannya sudah ada kriteria dimasing-masing kerusakan rumah, ada rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

Sehingga dari situ dapat kita pahami bahwa mereka kurang memahami dan mereka masih ngotot untuk membikin data sendiri dan ngotot untuk membandingkan data yang mereka buat dengan data yang dibuat oleh fasilitator. Yang membikin data itu dari kelompok yang 50 orang, apa untungnya mereka membikin data seperti itu toh tidak ada juga legalitasnya. Dan mereka juga tidak ada wewenang untuk melakukan pendataan. Fasilitator sebagai pendata mereka sudah ada pelatihan, membutuhkan banyak biaya dan juga sudah banyak menghabiskan waktu.

Dapat kita lihat bahwa, komunikasi mereka teputus dan sama sekali tidak ada. Sehingga kita pertemukan melalui mediasi, ternyata komunikasi mereka tidak nyambung. Dan mereka yang 50 tadi tetap ngotot untuk dimasukan kedalam data pada tahap III dan data mereka harus tetap dibandingkan dengan data yang sudah dibuat dengan fasilitator, sehingga mereka harus dapat bantuan gempa pada tahap III ini. Dari yang 50 itu ada 1 orang pemandunya yaitu ibu eti alamatnya disurau gadang. Sehingga dengan begitu, kita tutup mediasi dan tidak mencapai kesepakatan.

Tetapi dari itu, PJOK kota Padang akan melakukan validasi ulang data di kelurahan surau gadang, sehingga mereka yang belum terdaftar akan dimasukan kedalam daftar penerima dana gempa pada tahap IV.

Informan IV

Tanggal : 13 Januari 2012
Lokasi : di kantor Lurah Surau Gadang Kecamatan Nanggalo

a. Identitas Informan :

Nama	: Elfian
Umur	: 45 Tahun
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Pendidikan Terakhir	: Sarjana
Jabatan	: Kepala Lurah Surau Gadang
Status	: Menikah
Agama	: Islam

Banyak warga yang mendatangi kantor Lurah masalah gempa, ada lebih kurang 20 Pokmas yang komplek. Mereka menuntut lambannya penyaluran dana gempa, sehingga mereka menuntut untuk mencairkan dana lebih cepat. Ada juga warga yang mendatangi kepada saya tentang warga yang tidak terdata dalam penerima dana gempa, lebih kurang 50 KK yang mendatangi kantor lurah untuk dimasukan nama mereka pada tahap tiga. Sehingga mereka mengira dana gempa ini dibagikan tidak rata. Saya tidak begitu menanggapi, saya hanya menjalankan tugas sebagai pendamping masyarakat dalam melaksana rehab rekon di kelurahan ini, jadi rumah warga yang benar-benar rusak menurut kriteria dan sesuai dengan persyaratan itu yang menurut saya yang berhak sebagai penerima dana gempa.

Informan V

Tanggal : 2 Februari 2012
Lokasi : di Jln Parak Kopi No.27 Siteba

- a. Identitas Informan :
- | | |
|---------------------|---|
| Nama | : Nina Gustina |
| Umur | : 27 Tahun |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : Sarjana Teknik |
| Jabatan | : Fasilitator Teknik Kelurahan Surau Gadang |
| Status | : Menikah |
| Agama | : Islam |

Masalah di kelurahan Surau Gadang itu banyak, cuman mungkin ada ketidak puasan seseorang, misalnya kan ada beberapa orang yang dia koordinir. Yang dia koordinir itu tidak masuk pada tahap tiga, dia maunya dimasukan data pada tahap tiga ini ternyata setelah dicek rumahnya sama PJOK, KMK, KPM dan TPM rumah mereka tidak masuk kriteria kerusakan. Mereka ngotot dan mendatangi kantor PJOK untuk tetap dimasukan nama-nama mereka ke tahap tiga.

Sebelumnya Nina dan pihak fasilitator yang lainnya sudah secara langsung mendatangi dan mendata masing-masing rumah warga yang ada di kelurahan surau gadang itu. Menurut kami sebagai fasilitator mereka emang tidak masuk kriteria kerusakan pada rumahnya makanya kami tidak masukan mereka pada daftar kerusakan rumah. Tetapi mereka masih tetap

ngotot untuk dimasukan pada Tahap III. Sampai mereka melontarkan kata-kata :

Maso iyo lo, rumah awak nan banyak rusaknyo, dak dimasuk an namo awak di tahap III ko do. Padahal tetangga awak, rumahnyo saketek rusaknyo lai ado namonyo di tahap III. Terdaftar nyo ditahap III. Rumah awak dak ado terdaftar doo. (Evi Nurita, 37, warga surau gadang).

Sehingga kami fasilitator menyimpulkan adanya kecemburuan social yang dimiliki oleh masyarakat karena mereka merasa sama-sama berhak penerima dana gempa pada tahap III. Ada juga seorang warga surau gadang yang bernama evinurita yang tinggal juga di surau gadang dia melapor ke kantor polisi bahwa salah seorang ketua RT surau Gadang RT5 / RW3 yang bernama pak Nursal, dia melaporkan kalau pak nursal itu telah menggelapkan dana gemp tahap III sejak September 2011 lalu dan sampai kini kasusnya masih dalam proses.

Informan VI

Tanggal : 2 Februari 2012
Lokasi : di Siteba.

a. Identitas Informan :

Nama	: Ahwarni.
Umur	: 29 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: Sarjana Teknik
Jabatan	: Fasilitator Teknik kelurahan Surau Gadang)
Status	: Menikah
Agama	: Islam

Warga Surau Gadang protes ke Pjok karena mereka tidak terdaftar pada tahap III dana gempa, sehingga warga tersebut mendatangi PJOK kota padang dan meminta supaya mereka dimasukan nama-nama mereka pada tahap III. Saya sebagai fasilitator sudah mendata masing-masing warga surau gadang untuk meninjau secara langsung rumah mereka yang rusak akibat gempa. Tetapi ada sebagian warga surau gadang yang ngotot dan meminta mereka membandingkan data yang mereka dapat dilapangan

dengan data fasilitator, karena warga tersebut curiga kami tidak bekerja sesuai juknis. Padahal fasilitator ini bekerja berdasarkan juknis.

2. Hasil Wawancara Dengan Warga Kelurahan Surau Gadang

Informan VII

Tanggal : 3-10 Februari 2012

Lokasi : di Jln. Dahlia No.31 Kelurahan Surau Gadang Siteba

a. Identitas Informan :

Nama	: Efi Nurita.
Umur	: 37 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SMU
Jabatan	: Koordinator warga Surau Gadang 50 KK
Status	: Janda
Agama	: Islam

Perjuangan tentang masalah dana gempa

Saya Efinurita sebagai ketua dalam memperjuangkan warga surau gadang yang secara langsung protes k PJOK kota Padang, warga sebanyak 50 kk yang tidak terdaftar sebagai penerima dana gempa 30 september. Efi membantu kawan-kawan yang 50 kk untuk memperjuangkan haknya yang melapor k PJOK kota padang. Ketika itu PJOK menghubungi pak lurah supaya warga 50 kk tesebut datanya difalidasi oleh fasilitator. Tetapi pengaduan efi tidak diterima oleh pak lurah. Dan pak lurah berkata :

"Saya tidak ada lagi tanggung jawab tentang pembagian dana gempa karena semua data sudah difalidasi oleh fasilitator." Ujar pak lurah surau gadang.

Pengaduan efi tidak diterima, sehingga kasus tetap berlanjut dan dimediasi oleh kantor ham kota padang. Dari mediasi itu tidak juga mencapai kesepakatan. Sehingga efi dan kawan-kawan yang 50 langsung melapor k kantor gubenur Sumatra barat.

Pengaduan efi diterima baik oleh gubenur, bahkan pengaduan efi juga sampai ke kantor DPR kota padang. Efi mempunyai bukti dan data yang kuat tentang rumah kawan-kawan 50 kk yang rusak. laporan dan lampiran efi diterima dan disuruh untuk menyelesaikan kerja efi ini

dengan setuntas-tuntasnya, dan akan mendapatkan dana gempa pada tahap III. Tetapi semua tidak benar hanya omong kosong saja, semua yang mereka bilang hanya janji dan sama sekali tidak ada kami yang 50 mendapatkan dana gempa.

Saya dan kawan-kawan tetap ngotot supaya data efi dapat dibandingkan dengan data fasilitator dilapangan, efi melihat banyak kecurangan dalam pembagian dana gempa, sehingga banyak masyarakat rumahnya hancur kena gempa dan tidak mendapat bantuan gempa. Hal ini terjadi karena fasilitator tidak benar-bener secara langsung mendatangi rumah warga untuk memastikan kerusakan rumah mereka. Fasilitator hanya memantau kerusakan rumah warga dari data kerurahan saja tanpa langsung terjun kelapangan.

Efi melihat bahwa dengan ketidak becusan fasilitator dalam mendata rumah, maka dalam satu rumah dapat ditemukan 3 orang penerima dana gempa (bapak,ibu dan anak kosan. Karena KTP mereka tidak sama dalam 1 rumah).

Informan VIII

Tanggal : 11 Februari 2012

Lokasi : di Siteba.

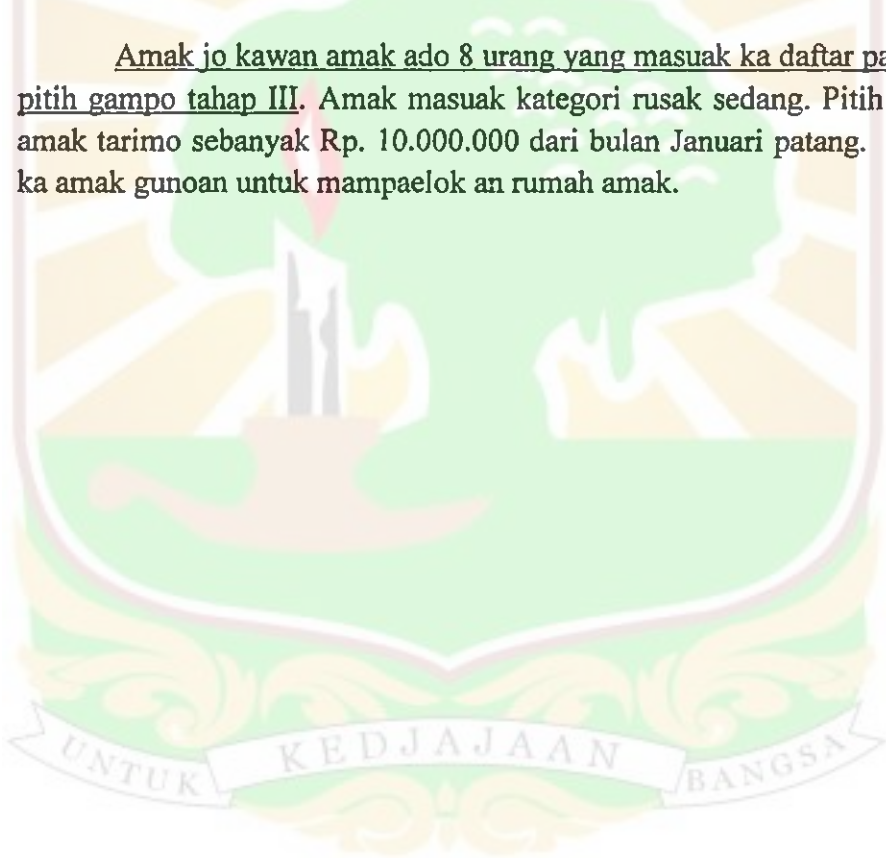
a. Identitas Informan :

Nama	: Nurima
Umur	: 60 Tahun
Jenis kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SD
Jabatan	: Penerima dana RR tahap III
Status	: Janda
Agama	: Islam

Rumah amak di perjuangkan efi nurita untuak masuak ka namo-namo panarimo pitih gampo yang tahap III ko. Efi tu mamperjuangkan amak jo kawan-kawan yang sabanyak 50 orang. Waktu itu, Amak jo kawan-kawan amak datang ka kantuan PJOK manjalehan ba a kok amak dak masuak ka daftar panarimo pitih gampo. Katiko itu, apak PJOK manjalehan kalau amak jo kawan-kawan amak yang 50 tu dak masuak kriteria karusan. Tapi si Efi ko dak pueh nyo jo panjalehan apak PJOK

Soalnya amak jo kawan-kawan amak punyo data yang kuek kalau rumah kami ko lebih banyak rusaknyo dari pado rumah orang-orang yang masuak namo di panerimo piti gampo tahap III ko. Si efi taruih mangadu ka kantor Kom Nas Ham untuk dimediasi jo PJOK tu untuk perlindungan sebagai penerima dana gampo ko. Mediasi tu ndak lo mencapai kesepakatan. Akhirnya efi mangadu ka kantor gubernur, tapi ndak lo ditanggapi do. Setelah itu, dak lamo sasudah itu datanglah fasilitator dan PJOK karumah amak mampareso rumah amak nan rusak dek gampo, kebetulan rumah amak alun ado diperbaiki sajak gampo. Jadi ketika piti gampo tu ka disalurkan ternyata amak masuak daftar panarimo pitih gampo tahap III.

Amak jo kawan amak ado 8 urang yang masuak ka daftar panarimo pitih gampo tahap III. Amak masuak kategori rusak sedang. Pitih tu alah amak tarimo sebanyak Rp. 10.000.000 dari bulan Januari patang. Pitih tu ka amak gunoan untuk mampaelok an rumah amak.



Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara



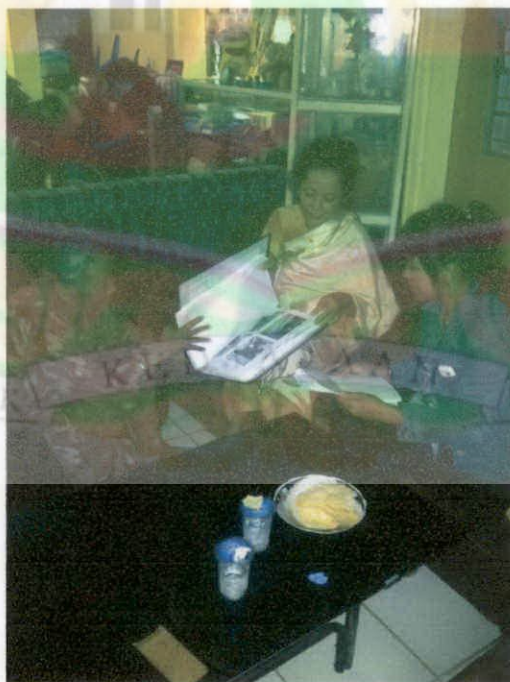
Gambar 1 ;
Wawancara dengan ketua PJOK (Aznul, ZA, 54 Tahun)
Dan Sekretaris PJOK Kota Padang (Rani Ahmad Yani, 25 tahun)
Di Kantor PJOK kota Padang



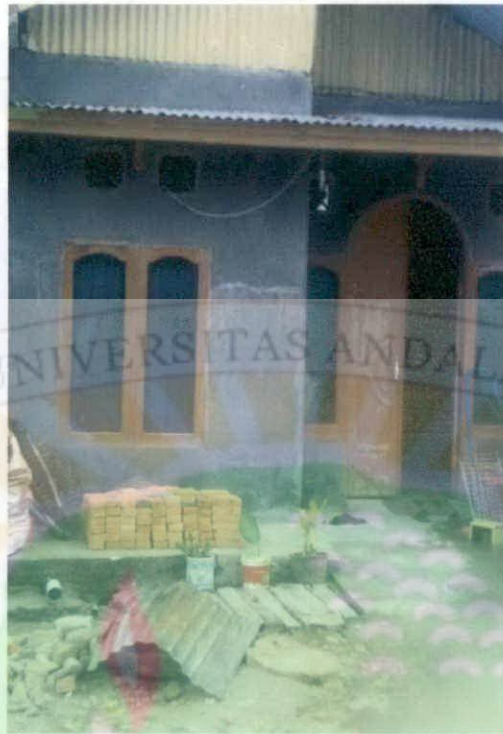
Gambar 2 ;
Wawancara dengan fasilitator teknik
kelurahan Surau Gadang (Nina Gustina, 27 tahun)
di Rumah Informan



Gambar 3 ;
Wawancara dengan Sekretaris
PJOK kota Padang (Rani Ahmad Yani, 25 tahun)
Di Kantor PJOK kota Padang



Gambar 4 ;
Wawancara dengan Buk Efi Nurita dan nenek Nurima warga kelurahan
Surau Gadang yang memprotes PJOK Kota Padang



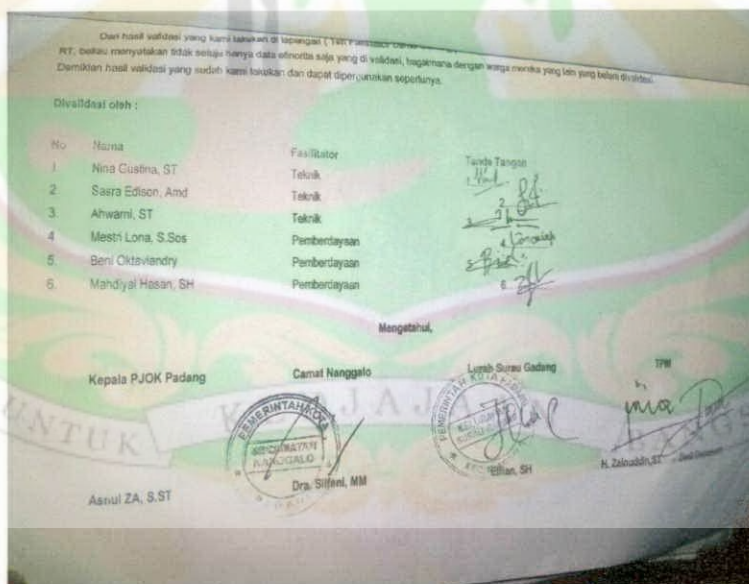
Gambar 5 ;
Rumah nenek Nurima yang sudah diperbaiki dengan menggunakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa 30 September 2009 Sumatera Barat tahap III.



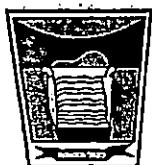
Gambar 6 ;
Kantor PJOK kota Padang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat



Gambar 7 ;
Daftar Kelompok Masyarakat Penerima Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Gempa 30 September 2009 Kota Padang Tahap III
di Kantor PJOK Kota Padang



Gambar 8 ;
Nama-Nama Fasilitator Kelurahan Surau Gadang
Kecamatan Nanggalo (Diambil Dari Lampiran Warga Kelurahan Surau Gadang
Yang Melakukan Protes Kepada PJOK Kota Padang, Buk Efi Nurita)



KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.20.94 /Kesbang/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Surat dari Pembantu Dekan I, FISIP UNAND

Nomor : 2098/UN.16.09/PP/2011

tanggal 05 Desember 2011

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 27 Desember 2011

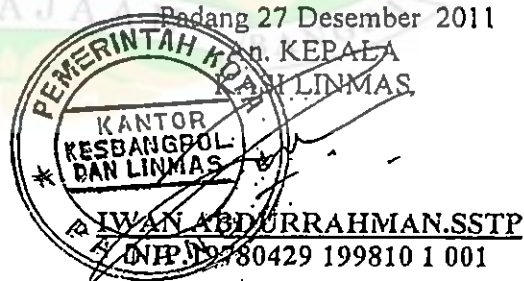
Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: SOVIA JASMAN
Tempat/Tanggal Lahir	: Limau Gadang, 05 Oktober 1990
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat di Padang	: Perumahan Cendana Anak Air Koto Tengah
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Protes Penerima Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat
Waktu/Lama Penelitian	: 2 (dua) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	: BPBD, Dinas PU, Lurah Surau Gadang Kec.Nanggalo
Anggota Rombongan	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang 27 Desember 2011



Diteruskan Kepada Yth,

1. Kepala BPBD Kota Padang
2. Kepala Dinas PU Kota Padang
3. Camat Nanggalo
4. Lurah Surau Gadang
5. Pembantu Dekan I, FISIP Unand
6. Yang bersangkutan
7. Peringgal



PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN NANGGALO

Jl. Raya Pagang Padang

Telp. 0751-7057934

Padang, 12 Januari 2012

Nomor : 49 /CN-Trantib/2012
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Sdr. Lurah Kelurahan Surau Gadang
Di
Padang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Bapak Kepala Kantor Kesbang dan Politik No. 070.20.94 /Kesbang/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal yang sama seperti pokok surat diatas, bahwa akan datang kepada Saudara sebagai berikut:

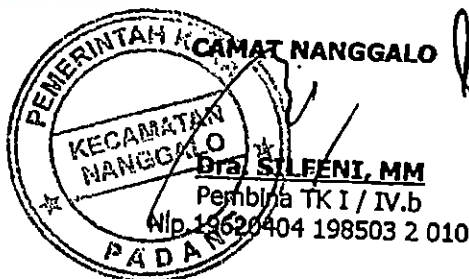
Nama : **SOVIA JASMAN**
Tempat/Tgl. Lahir : Limau Gadang / 05 Oktober 1990
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Cendana Anak Air Koto Tengah
Maksud Penelitian : Penyelesaian Skripsi
Waktu/Lama Penelitian : 2 (dua) bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL : **Protes Penerima Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat**
Lokasi Penelitian : Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo
Anggota Rombongan : -

Akan melakukan penelitian/survei/pemetaan/PKL di wilayah Kecamatan Nanggalo.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara untuk dapat membantu sepanjang yang bersangkutan dapat mematuhi hal sebagai berikut:

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka penelitian serta maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat Rekomendasi ini supaya melaporkan maksud kedatangan Saudara kepada Kepala Kantor yang dihubungi dan begitu juga setelah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Setelah penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Bapak Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan diatas, maka surat rekomendasi akan ditinjau kembali.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Padang
Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip—

PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN NANGGALO
KELURAHAN SURAU GADANG

Alamat : Jln. Padang No.4-5 Komp. Perumnas Siteba Padang Telp. 0751 443968

Nomor : 02/SG-PM/I-2012
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Padang, 12 Januari 2012

Kepada Yth :
Bapak Ketua RW Se-Kelurahan Surau Gadang
di
Padang

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Ibu Camat No. 49/CN-Trantib/2012 Tanggal 12 Januari 2012 perihal Izin Penelitian bahwa akan datang kepada Bapak :

Nama : SOVIA JASMAN
Pendidikan/Jurusan : S.1 / Sosiologi
Pekerjaan : Mahasiswa
No.BP : 0810811003
Alamat : JL. Perumahan Cendana Anak Air Koto Tengah
Waktu / Lama Penelitian : 2 (dua) Bulan
Judul Penelitian/Survey/PKL : **Protes Penerima Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009 Sumatera Barat**
Lokasi Penelitian : RW Se-Kelurahan Surau Gadang
Anggota Rombongan : -

Untuk melakukan penelitian di RW Se-Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta bantuan Bapak untuk dapat membantu sepanjang yang bersangkutan dapat mematuhi hal sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka penelitian serta maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan surat Rekomendasi ini supaya melaporkan maksud kedatangan saudara kepada Bapak Ketua RW begitu juga setelah mengadakan penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menghormati Adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Setelah penelitian selesai harus melaporkan hasilnya kepada Bapak Lurah.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan diatas, maka surat Rekomendasi akan ditinjau kembali.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Lurah Surau Gadang

(N. F. I. A. N, SH.)
NIP. 196705091986111001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ibu Camat Nanggalo
2. Yang bersangkutan

Padang, 9 Desember 2011

Perihal : Masalah Dana Gempa
Kelurahan Surau Gadang Kec. Nanggalo

Kepada
Bapak Walikota Padang
Di Tempat

Dengan hormat,

Doa dan harapan kami warga Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo semoga Bapak Walikota senantiasa berada dalam kondisi yang sehat serta selalu di lindungi oleh Allah SAW, di dalam menjunjung tinggi amanah Bangsa dan Negara. Selanjutnya kami warga Surau Gadang melaporkan permasalahan bantuan gempa yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan sebagai contoh bukti terlampir

1. Hasil keputusan rapat di palanta rumah Walikota padang pada tanggal 29 Juli 2011 yang dihadiri oleh seluruh Camat dan Lurah Sekota Padang serta DPRD kota Padang tidak dijalankan dengan sebenarnya bukti terlampir
2. Pada tanggal 15 November 2011 pergi demo ke kantor Lurah Surau Gadang menolak bantuan Gempa Tahap 4 keinginan warga maunya Tahap 3
3. Pada tanggal 16 November 2011 berita acara hasil pertemuan Kepala pjok padang Camat Nanggalo, Lurah Surau Gadang tim pendamping Masyarakat (TPM) dan Fasilitator berbunyi banyaknya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya :
 - Fasilitator mendata warga itu dikatakan oleh RT data yang di berikan oleh Efinurita adalah bohong kenyataannya bukti terlampir.
 - Mapardi dan Gusrarendi sudah di keluar di POPMAS ternyata Cuma mapardi saja yang keluar, dan bukti terlampir.
 - Fasilitator mendata ulang pada tanggal 3 Desember 2011 dengan membawa Polisi lintas, seharusnya harus dengan Kapolsek Siteba.
 - Pada tanggal 26 November 2011 data korban Gempa masih bermasalah, bukti terlampir.
 - Pada tanggal 5 Desember 2011 warga Surau Gadang curigai Falidasi bukti terlampir.
4. Permohonan kami agar jangan terjadi Korupsi Meraja lela di Kelurahan Surau Gadang, kami mohon hentikan dulu dana Bantuan gempa tahap 3 khususnya Kelurahan Surau Gadang dan kami mohon juga turunkan tim Investigasi dari pusat agar kami merasakan keadilan dengan membandingkan data di Kelurahan sebanyak 289 KK dengan kami yang hanya 50 KK ini. Dari situlah nanti akan terlihat nanti kebenarannya

Demikianlah surat ini kami sampaikan semoga Bapak wali Kota berkenan menyelesaikan dan kami warga Surau Gadang juga siap dipanggil dan berdialog dengan Bapak Wali Kota. Terakhir hanya kepada Allah SAW memohon perlindungannya.

Wasalam
Kordinator



EFINURITA
HP. 081266839639

Padang, 9 Desember 2011

Perihal : Masalah Dana Gempa
Kelurahan Surau Gadang Kec. Nanggalo

Kepada
Bapak Gubernur Sumbar
Di Tempat

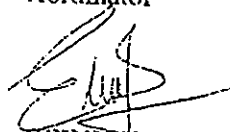
Dengan hormat,

Doa dan harapan kami warga Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo semoga Bapak Gubernur senantiasa berada dalam kondisi yang sehat serta selalu di lindungi oleh Allah SAW, di dalam menjunjung tinggi amanah Bangsa dan Negara. Selanjutnya kami warga Surau Gadang melaporkan permasalahan bantuan gempa yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan sebagai contoh bukti terlampir

1. Hasil keputusan rapat di palanta rumah Walikota padang pada tanggal 29 Juli 2011 yang dihadiri oleh seluruh Camat dan Lurah Sekota Padang serta DPRD kota Padang tidak dijalankan dengan sebenarnya bukti terlampir
2. Pada tanggal 15 November 2011 pergi demo ke kantor Lurah Surau Gadang menolak bantuan Gempa Tahap 4 keinginan warga maunya Tahap 3
3. Pada tanggal 16 November 2011 berita acara hasil pertemuan Kepala pjok padang Camat Nanggalo, Lurah Surau Gadang tim pendamping Masyarakat (TPM) dan Fasilitator berbunyi banyaknya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya :
 - a. Fasilitator mendata warga itu dikatakan oleh RT data yang di berikan oleh Efinurita adalah bohong kenyataannya bukti terlampir.
 - b. Mapardi dan Gusarendi sudah di keluar di POPMAS ternyata Cuma mapardi saja yang keluar, dan bukti terlampir.
 - c. Fasilitator mendata ulang pada tanggal 3 Desember 2011 dengan membawa Polisi lantas, seharusnya harus dengan Kapolsek Siteba.
 - d. Pada tanggal 26 November 2011 data korban Gempa masih bermasalah, bukti terlampir.
 - e. Pada tanggal 5 Desember 2011 warga Surau Gadang curigai Falidasi bukti terlampir.
4. Permohonan kami agar jangan terjadi Korupsi Meraja lela di Kelurahan Surau Gadang, kami mohon hentikan dulu dana Bantuan gempa tahap 3 khususnya Kelurahan Surau Gadang dan kami mohon juga turunkan tim Investigasi dari pusat agar kami merasakan keadilan dengan membandingkan data di Kelurahan sebanyak 289 KK dengan kami yang hanya 50 KK ini. Dari situlah nanti akan terlihat nanti kebenarannya

Demikianlah surat ini kami sampaikan semoga Bapak Gubernur berkenan menyelesaikan persoalan dan kami warga Surau Gadang juga siap dipanggil dan berdialog dengan Bapak Gubernur Sumbar. Terakhir hanya kepada Allah SAW memohon perlindungannya.

Wasalam
Kordinator

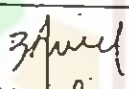
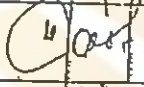
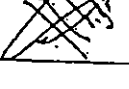

EFINURITA
HP. 081266839639

SURAT PERNYATAAN WARGA

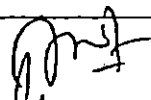
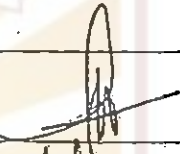
KELURAHAN SURAU GADANG,KEC.NANGGALO

Kami yang bertanda tangan dibawah ini warga kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo menyatakan bahwa kami tidak mendapat atau didata oleh fasilitator untuk mendapatkan bantuan dana gempa tahap 3 tapi kami diancam kalau ingin mendapat bantuan juga tapi ditahap 4 dengan meminta biodata baru kami lagi. Oleh sebab itu kami memohon kepada Bapak lurah dan Ibu camat melalui coordinator yang kami percayakan yang EFINORITA untuk mengurus permasalahan kami ini.

Berikut ini terlampir daftar nama dan tanda tangan warga yang membuat pernyataan :

No	Nama	Alamat Anggota	Tanda Tangan
1	MARADIN MATEUS GIRSAM	RT 04/RW 03	
2	DEWI PRIMA NANDA	RT 04/RW 03	
3	MESI KRISTINA BR. SINAGA	RT 01/RW 03	
4	MALIK	RT 01/RW 03	
5	SAMSIRUDIN/ERLINDA	RT 02/RW 03	
6	IDA MAIWATI	RT 01/RW 03	
7	SOEGUONO	RT 01/RW 13	
8	DWI PRIYANTO	RT 01/RW 13	
9	NUNUNG AIDAWATI	RT 01/RW 13	
10	SOEMINI,S.Pd	RT 01/RW 13	
11	YUSMA FARIDA	RT 01/RW 13	
12	FLORENTINUS MOELANI	RT 01/RW 13	

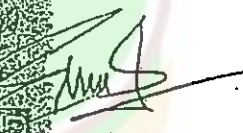
13	MULYATI	RT 01/RW 13	
14	ALBERT FITRI	RT 01/RW 13	
15	DRS. GUSRARERDI	RT 05/RW 21	
16		RT 01/RW 13	
17	ADI GUSTIADI	RT 01/RW 13	
18	JAMARIN MANAN ST.ENDAH	RT 04/RW 12	
19	Ir. YASIR SYUKUR	RT 02/RW 13	
20	KORNEL T	RT 01/RW 18	
21	KARTINI	RT 06/RW 13	
22	GAFAR	RT 05/RW 03	
23		RT 01/RW 13	
24	YUSNIMAR	RT 05/RW 03	
25	SYAMSIR	RT 04/RW 12	
26	NURMA	RT 01/RW 03	
27	RASYID	RT 01/RW 03	
28	MUSTIMAR	RT 01/RW 03	
29	SYARIPUDDIN	RT 05/RW 03	
30	ZUBAIDAH	RT 01/RW 03	
31	ROHAZAR	RT 02/RW 03	
32	SYAMSIDAR	RT 01/RW 03	

33	AMINAH	RT 03/RW 14	
34	SAHRIAL	RT 05/RW 03	
35	JASRIANI	RT 05/RW 03	
36	YUSUTRIA	RT 01/RW 03	
37	NURHAYATI	RT 02/RW 18	
38	ANITA	RT 04/RW 12	
39	RATNA WIRMA	RT 04/RW 12	
40	HARDI NIKO PASMANA	RT 01/RW 03	

Demikianlah surat pernyataan ini yang kami buat tanpa ada paksaan dari manapun/Intimidasi, sekian dan terimakasih.

Yang mewakili Warga 40


MALIK

Kordinator

EFINORITA

Mengetahui RT-RW yang mendukung dana gempa tahap 3 kelurahan surau gadang.

1	RT 01/RT 03	DARWAS
---	-------------	--------

2	RT 02/RW 03	BUSTAMI
3	RT 04/RW 03	IRWAN WIJAYA
4	RT 05/RW 03	MURSAL
5	RT 04/RW 12	ANITA
6	RT 01/RW 13	SAMIONO
7	RT 02/RW 13	
8	RT 06/RW 13	
9	RT 03/RW 14	
10	RT 01/RW 18	ALIF

UNIVERSITAS ANDALAS



KETUA RT.04/RW.12
KEL: SURAU GADANG
KEC: NANGGALO



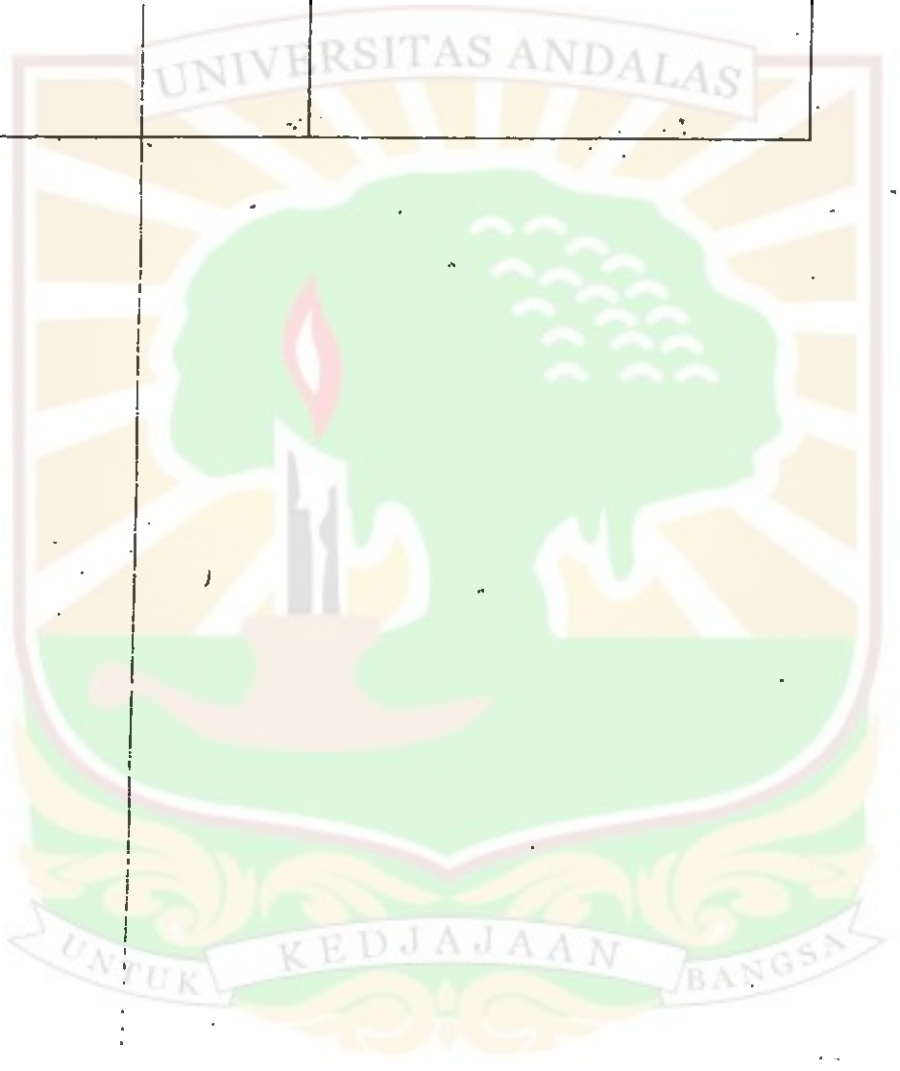
KETUA RT.2/RW.13
KELURAHAN SURAU GADANG
KECAMATAN NANGGALO PADANG

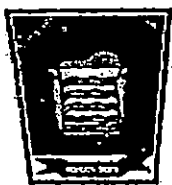


KETUA RT.6/RW.13
KELURAHAN SURAU GADANG
KECAMATAN NANGGALO PADANG

UNTUK K

11	RT 02/RW 18	
12	RT 05/RW 21	SYUFRIADI





PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK) KOTA PADANG
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG PERUMAHAN TAHAP III
Jl. Gajah Mada No. 36 Gunung Pangilun Padang, SMS Center : 081266 99 103



Nomor : 010/PJOK.I/RR.III.Perum/XII/2011
Lampiran : 1 (satu) exemplar
Perihal : **Penjelasan**

Padang 12 Desember 2011

Kepada Yth :

Bapak Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
di
Tempat

Berdasarkan surat Bapak Nomor 338/P.Ekosob/3.5.2/XII/2011 perihal : **Permintaan Klarifikasi ke II** tanggal 9 Desember 2011, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Surat Bapak dengan Nomor 327/P.Ekosob/3.5.2/XII/2011, perihal Permintaan Klarifikasi yang kami terima tanggal 7 Desember 2011 via pos dengan surat tertanggal 5 Desember 2011, untuk klarifikasi kami diberikan waktu selama empat hari setelah surat kami terima.
2. Pada tanggal 9 Desember 2011, kami telah menyiapkan surat Klarifikasi, lalu kami menghubungi staff Komnas HAM (Sdri. Marlia Dini) melalui tim Fasilitator (Nina Gustina ST), bahwa kami dari PJOK RR Bidang Perumahan Tahap III kota Padang ingin bertemu dengan Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mengantarkan Klarifikasi kami sesuai dengan hasil pertemuan yang sudah kami lakukan dengan Camat Nanggalo, Lurah Surau Gadang, TPM, Fasilitator bertempat di kantor Camat Nanggalo, ternyata disarankan kepada kami untuk Klarifikasi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 dengan alasan bahwa Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak berada di tempat.
3. Dalam hal ini kami sangat menyayangkan sekali dengan datangnya surat permintaan Klarifikasi yang ke II, yang kami terima pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 via pos, karena waktu yang diberikan kepada kami tidak sesuai dengan kenyataannya.

4. Permasalahan – permasalahan kegiatan Rehab Rekon Bidang Perumahan, kami dari PJOK tidak puas dengan memberikan melalui surat klarifikasi, karena perlu kita adakan dialog sehingga kami bisa menjelaskan pada Bapak prosesnya Kegiatan Rehab Rekon sesuai juknis (petunjuk teknis) yang dikeluarkan oleh TIM Pendukung Teknis BNPB Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas kerja sama dan perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Pejabat PJOK Rehab Rekon
Bidang Perumahan Kota Padang**


ISNUL ZA, S.ST)
NIP. 19580729 198101 1 001

Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Bapak Ketua Komnas HAM Indonesia Cq. Wakil Ketua Bidang Internal (sebagai laporan)
2. Bapak Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Cq. Ka. Biro Administrasi Penegakan Hukum dan HAM Setjen Komnas HAM
3. Bapak Walikota Padang
4. Bapak Ketua DPRD Kota Padang
5. Bapak TPT BNPB Sumbar
6. Bapak Ketua BPBD Prov. Sumbar
7. Bapak PPK.RR Bidang Perumahan Sumbar
8. Bapak PJOK RR Bidang Perumahan Sumbar
9. Bapak Dinas PU Kota Padang
10. Bapak Ketua BPBD Kota Padang
11. Camat Nanggalo
12. Lurah Surau Gadang
13. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK) KOTA PADANG
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG PERUMAHAN TAHAP III
Jl. Gajah Mada No. 36 Gunung Pangliru Padang, SMS Center : 081266 99 103



Nomor : 009/PJOK.I/RR.III.Perum/XII/2011

Padang 09 Desember 2011

Lampiran :

Perihal : Klarifikasi

Kepada Yth :

Bapak Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
di
Tempat

Sesuai dengan surat Bapak Nomor 327/P.Ekosob/3.5.2/XII/2011 perihal : Permintaan Klarifikasi tanggal 5 Desember 2011, maka dengan ini kami berikan penjelasan klarifikasinya, sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari penilaian tim Fasilitator setelah melakukan validasi di Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, dan juga telah dimonitoring bersama staff teknik PJOK kota Padang, bahwa data yang ada menurut kami adalah yang berhak menerima bantuan tahap III ini dan juga sudah di sidang plenokan di kelurahan Surau Gadang ataupun di PJOK Kota Padang.
2. Tim PJOK Kota Padang bukan memvalidasi melainkan ikut memonitoring validasi tim fasilitator, dan disini RT/TPM diikut sertakan.

Berikut adalah klarifikasi atas kejanggalan-kejanggalan dari :

No.	Nama	Alamat	Permasalahan	Penyelesaian	Keterangan
1.	ERIDA	Jl. Widuri No.17 RT 01 RW 03	Tidak punya KTP tetapi dapat dana gempa tahap III	Yang menerima bantuan gempa adalah rumah yang terkena gempa sesuai kategori bukan KTP.	
2.	SRI APRI MULIA	Jl. Widuri No.19 RT 01 RW 03	Tidak punya KTP tetapi dapat dana gempa tahap III	Yang menerima bantuan gempa adalah rumah yang terkena gempa sesuai kategori bukan KTP.	
3.	MAPARDI	Jl. Widuri No.18 RT 01 RW 03	Rumah tidak mengalami kerusakan oleh gempa 30 September 2009	Rumahnya saat ini masuk dalam kriteria penerima bantuan gempa menurut penilaian tim fasilitator, dan rumah	

			tetapi dapat bantuan gempa tahap III	sampai saat ini masih dalam keadaan miring.	
4.	JASINAR	Jl. Widuri No.21 RT 01 RW 03	Rumah di Jl. Widuri No. 21 mendapat bantuan gempa padahal Jasinar mengontrak di rumah orang lain	Tergantung kepada yang bersangkutan walaupun berdomisili di tempat lain.	
5.	ETICAN	RT 05 RW 03	Data dihilangkan	Sudah divalidasi oleh tim fasilitator tetapi tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan gempa tahap III	
6.	YASRI	Jl. Nusa Indah RT 02 RW 03	Data dihilangkan	Sampai saat ini data tidak ada yang dihilangkan dan hanya ada daftar tunggu tahap IV.	
7.	JANEWAR	RT 05 RW 03	Data dihilangkan	Sampai saat ini data tidak ada yang dihilangkan dan hanya ada daftar tunggu tahap IV.	

3. Tim Fasilitator memang mendapatkan data dari pihak kelurahan tetapi setelah Fasilitator turun kelapangan tidak semua data yang ada tervalidasi oleh Fasilitator karena ada lebih kurang 900 rumah yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan gempa tahap III karena keterbatasan tim Fasilitator dan Kuota yang ada. Dan menurut kami tim Fasilitator, data yang ada sekarang ini berhak untuk menerima bantuan gempa tahap III.
4. Tanggal 19 September 2011 Lurah, TPM dan Fasilitator belum mengundang seluruh warga untuk pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) tetapi kami mengundang tanggal 22 September 2011 untuk pembentukan POKMAS di Mesjid Al Hijriah.
5. Bukan hanya 50 orang saja yang belum mendapatkan bantuan gempa. Tetapi masih ada lebih kurang 600 rumah yang belum mendapatkan bantuan tahap III. Karena keterbatasan kuota untuk Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo. Khusus yang 50 orang tersebut telah divalidasi oleh Fasilitator dan TPM, ternyata banyak yang rusak ringan, bagi yang masuk kriteria sesuai juknis kami akomodir untuk Tahap III dan Tahap IV.
6. Kuota yang ditetapkan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) adalah sebanyak 244 rumah untuk Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo, dengan perincian sebagai berikut :

- Rusak Berat : 126 x Rp. 15.000.000 = Rp. 1.890.000.000
- Rusak sedang : 118 x Rp. 10.000.000 = Rp. 1.180.000.000

Sedangkan realisasi dilapangan setelah dilaksanakan validasi oleh Fasilitator dari tanggal 2 s/d 30 Agustus 2011 dengan hasilnya 289 rumah dengan rincian sebagai berikut

- Rusak Berat : 36 x Rp 15.000.000 = Rp. 540.000.000
- Rusak Sedang : 253 x Rp 10.000.000 = Rp 2.530.000.000

Dengan plafon dana yang ditetapkan untuk Kelurahan Surau Gadang adalah tetap yaitu sebesar Rp. 3.070.000.000,-

7. Hasil validasi sudah ditempelkan di Kantor Lurah Surau Gadang tanggal 9 s/d 16 September 2011.

Demikianlah hasil Klarifikasi ini kami sampaikan. Atas kerja sama dan perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Pejabat PJOK Rehab Rekon
Bidang Perumahan Kota Padang**



(ASNUL ZA, S.ST)

NIP : 19580729 198101 1 001

Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Bapak Ketua Komnas HAM Indonesia Cq. Wakil Ketua Bidang Internal (sebagai laporan)
2. Bapak Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Cq. Ka. Biro Administrasi Penegakan Hukum dan HAM Setjen Komnas HAM
3. Bapak Walikota Padang
4. Bapak Ketua DPRD Kota Padang
5. Bapak TPT BNPP Sumbar
6. Bapak Ketua BPBD Prov. Sumbar
7. Bapak PPK RR Bidang Perumahan Sumbar
8. Bapak PJOK RR Bidang Perumahan Sumbar
9. Bapak Dinas PU Kota Padang
10. Bapak Ketua BPBD Kota Padang
11. Camat Nanggalo
12. Lurah Surau Gadang
13. Arsip

**PROGRESS KEGIATAN
PJOK REHAB REKON BIDANG PERUMAHAN TAHAP III TA 2011
KOTA PADANG**

No.	Kecamatan / Kelurahan	DATA POTENSI			Tim Fasilitator	URATAN						Keterangan
		RB	RS	KK		Jml Kelurahan	Jumlah Pokmas	RB	RS	Total (KK)	Jumlah Dana	
A	KOTA PADANG											
I	LUBUK KILANGAN	635	583	1,218	15	7	89	140	1,243	1,383	14,530,000,000	
II	KOTO TANGAH	1,515	1,946	3,461	37	13	184	867	2,906	3,773	42,065,000,000	
III	KURANJI	499	1,574	2,173	25	9	115	152	2,201	2,363	24,290,000,000	
IV	PADANG BARAT	155	590	745	11	10	42	86	733	799	8,320,000,000	
V	PADANG UTARA	56	630	686	10	7	37	6	737	743	7,460,000,000	
VI	PADANG SELATAN	73	629	702	7	10	36	60	648	708	7,380,000,000	
VII	PADANG TIMUR	546	673	1,219	18	10	75	75	1,385	1,460	14,975,000,000	
VIII	NANGGALO	282	620	902	12	6	49	61	933	994	10,245,000,000	
IX	LUBUK BEGALUNG	5	1,557	1,562	21	15	75	14	1,568	1,582	15,890,000,000	
X	PAUH	152	327	479	8	7	26	64	458	522	5,540,000,000	
XI	BUNGUS TELUK KABUNG	290	321	611	7	2	31	182	483	665	7,560,000,000	
TOTAL		4,208	9,550	13,758	171	96	738	1,687	13,295	14,982	158,255,000,000	

Diketahui Oleh :
Pejabat PJOK RR Kota Padang

ANUL Z.A.SST
NIP. 19580729 198101 1 001

Padang, Desember 2011

Dibuat Oleh :

Sekretaris PJOK RR Kota Padang

RANI RAHMAD YANI A.Md

**PROGRESS KEGIATAN
REHAB REKON BIDANG PERUMAHAN TAHAP III TA 2011
KECAMATAN NANGGALO**

No.	Kecamatan / Kelurahan	DATA POTENSI			Tim Fasilitator	URAIAN							Keterangan
		RB	RS	KK		Jml Kelurahan	Jumlah Pokmas	RB	RS	Total (KK)	Jumlah Dana	No. SK WAKO	
VIII	NANGGALO												
1	Tabing Bd Gadang	6	88	94	1	OK	4	6	88	94	970,000,000	181	
2	Gurun Laweh	6	48	54	1	OK	3	2	54	56	570,000,000	181	
3	Kurao Pagang	129	119	248	3	OK	16	5	305	310	3,125,000,000	181	
4	Kampung Olo	15	205	220	3	OK	9	11	184	195	2,005,000,000	203	
5	Kampung Lapai	0	42	42	1	OK	2	0	42	42	420,000,000	203	
6	Suru Gadang	126	118	244	3	OK	15	37	260	297	3,155,000,000	215	
TOTAL		282	620	902	12	6	49	61	933	994	10,245,000,000		

Diketahui Oleh :
Pejabat PJOK RR Kota Padang



ASNUL ZA.S.ST
NIP. 19580729 198101 1 001

Padang, Desember 2011

Dibuat Oleh :

Sekretaris PJOK RR Kota Padang



RANI RAHMAD YANI, A.Md





**PJOK REHABILITASI REKONSTRUKSI
SEKTOR PERUMAHAN
KOTA PADANG**

LAPORAN

**KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERUMAHAN
PASCA BENCANA GEMPA BUMI 30 SEPTEMBER 2009
KOTA PADANG**



PRINSIP DASAR REHAB REKON SEKTOR PERUMAHAN

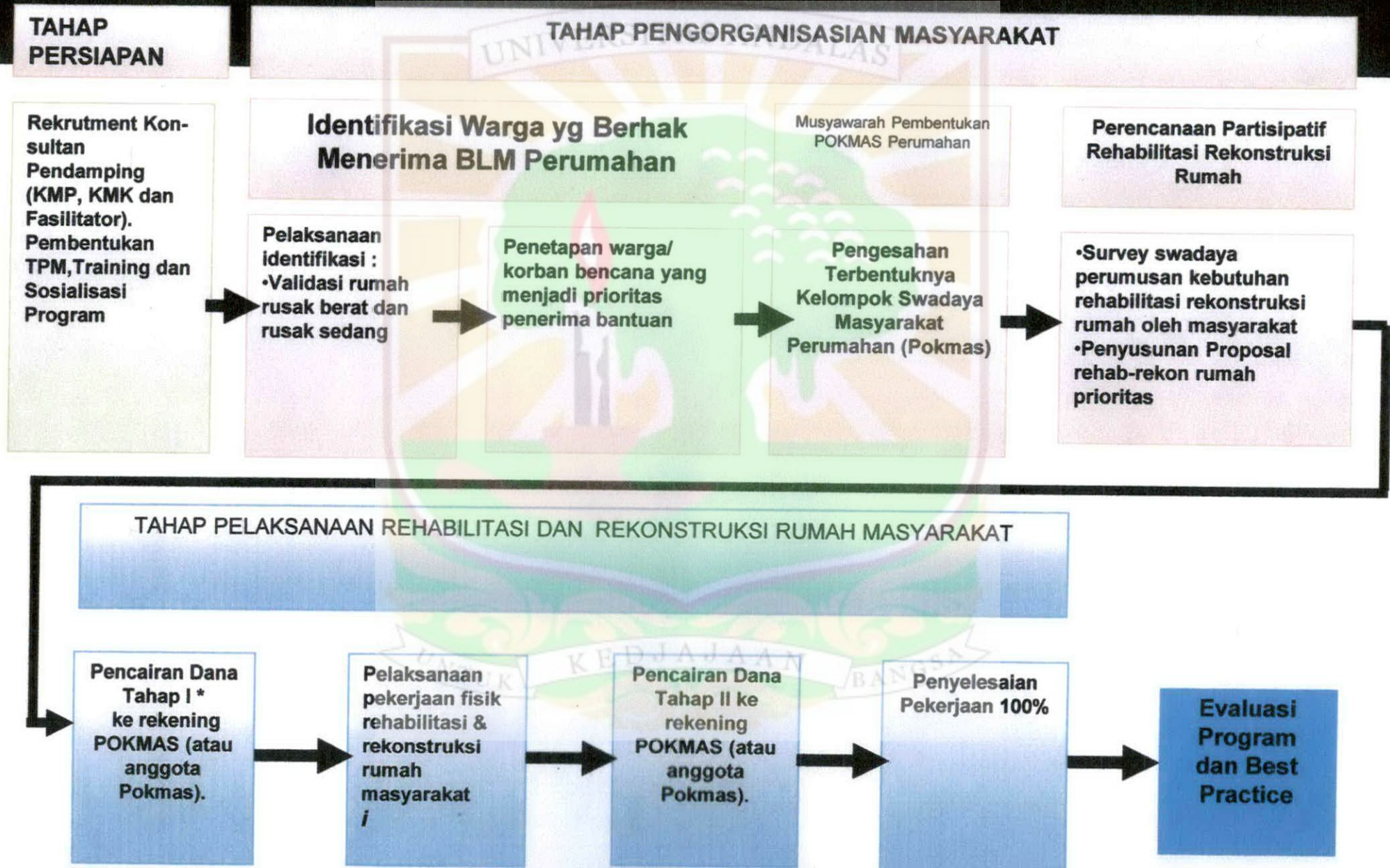
RUMAH YANG LEBIH AMAN

Kebersamaan dan Gotong Royong Masyarakat membangun rumah secara bertahap dg prioritas bagi warga masyarakat yang tidak mampu (miskin) dan kondisi kerusakan rumah rusak berat, & rusak sedang

Membangun Kesepakatan dan Aturan Masyarakat Prinsip Dasar Program Rehab/Rekon.

Pemberdayaan dan Pengorganisasian Masyarakat

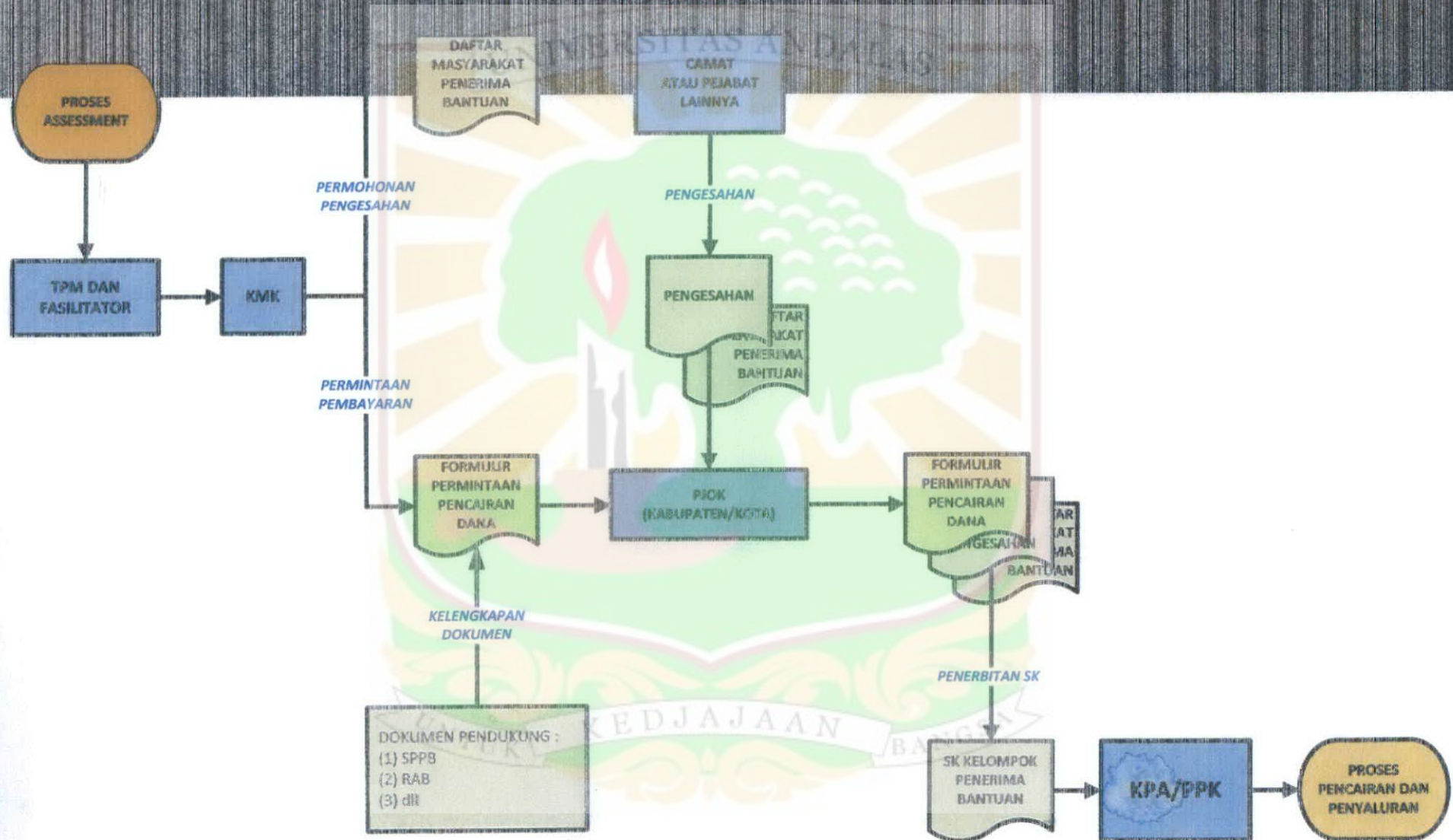
LANGKAH KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERUMAHAN



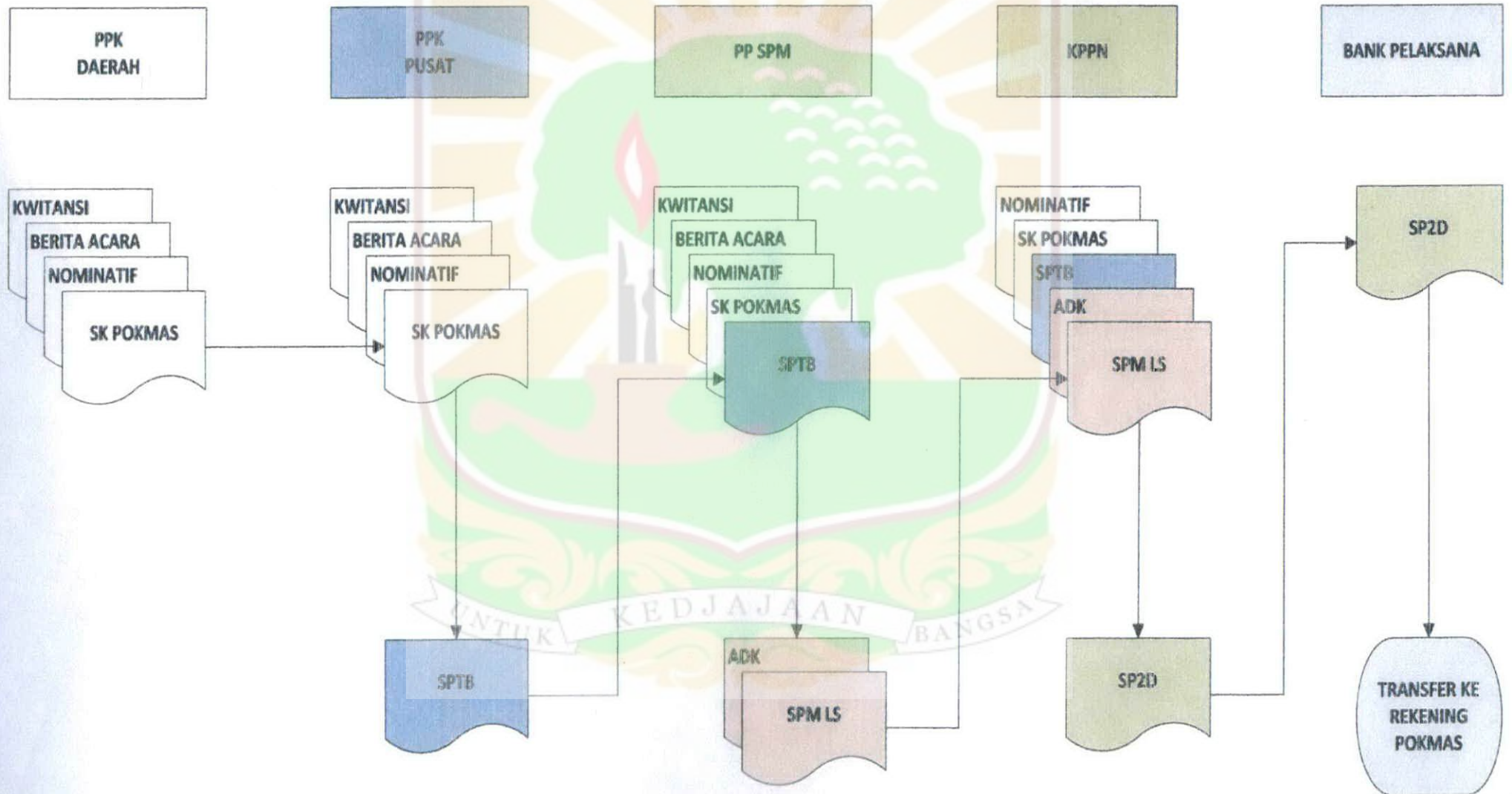
PENETAPAN KRITERIA KERUSAKAN

No	Kategori kerusakan	Kriteria kerusakan	Uraian
I	Berat	Bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak	- Bangunan roboh total - Sebagian besar struktur utama bangunan rusak - Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak - Secara fisik kondisi kerusakan >50% - Komponen penunjang lainnya rusak total - Membahayakan/beresiko difungsikan - Perbaikan dengan rekonstruksi
II	Sedang	Bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjangnya rusak	- Bangunan masih berdiri - Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak - Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak - Relatif masih berfungsi - Secara fisik kerusakan 30% - 50% - Perbaikan dengan rehabilitasi
III	Ringan	Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa difungsikan)	- Bangunan masih berdiri - Sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan - Retak-retak pada dinding plesteran - Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak - Masih bisa difungsikan - Secara fisik kerusakan <30 %

PROSES PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN



TATA CARA PENCAIRAN DANA BLM PERUMAHAN



VISUALISASI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BLM SEKTOR PERUMAHAN

